

BAB 3

BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA 2025: MENDORONG PERTUMBUHAN, MENJAGA STABILITAS

Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan terus mencermati ruang untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi (pro-stability and growth), sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pro-growth). Bauran kebijakan ini sebagai keseimbangan antara menjaga stabilitas dari dampak negatif rambatan ketidakpastian global dan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Bauran kebijakan utama didukung oleh penguatan kebijakan untuk pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), pengembangan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, serta kebijakan internasional.





Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2025 terus diperkuat dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Di bidang kebijakan moneter, dengan rendah dan terkendalinya inflasi dalam sasaran, penurunan suku bunga dan ekspansi operasi moneter ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Di bidang kebijakan makroprudensial, insentif likuiditas diberikan kepada perbankan untuk mendorong kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas dalam program Asta Cita Pemerintah. Di sistem pembayaran, digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan digital, khususnya pada sektor riil dan UMKM. Ketiga bauran kebijakan utama Bank Indonesia ini didukung penguatan kebijakan untuk pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), pengembangan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, serta kebijakan internasional.

3.1. **Konsepsi Bauran Kebijakan Bank Indonesia**

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU P2SK, tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK) dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas nilai Rupiah diukur dengan tercapainya sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah dan terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah didukung dengan kecukupan cadangan devisa (Gambar 3.1.). Stabilitas sistem pembayaran tecermin pada tingkat perputaran (velositas) peredaran uang (baik uang kertas, uang berbasis rekening, maupun uang digital) sesuai kebutuhan perekonomian, struktur industri sistem pembayaran nasional yang sehat dan efisien, serta penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran yang aman dan andal. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan (SSK)

tecermin pada optimalnya pertumbuhan kredit/pembiayaan, terjaganya risiko sistem keuangan, serta berkembangnya inklusi ekonomi dan keuangan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia turut menjaga SSK melalui kebijakan makroprudensial pada sektor perbankan dari sisi keterkaitan makro-finansial, mengingat tujuan SSK sebagai tanggung jawab bersama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ketiga aspek tujuan stabilitas Bank Indonesia tersebut sangat penting dan karenanya diarahkan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai tiga tugas yaitu kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran. Dengan demikian, dukungan Bank Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditempuh melalui ketiga tugas tersebut, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. *Pertama*, melalui kebijakan moneter, tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah sangat penting bagi tumbuh-kembang berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, baik oleh Pemerintah, sektor keuangan, dunia usaha, maupun masyarakat. Inflasi yang rendah meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat kepastian bagi dunia usaha. Demikian pula, stabilitas nilai tukar Rupiah sangat penting bagi terkendalinya inflasi, terjaganya stabilitas sistem keuangan, stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan pembiayaan fiskal Pemerintah, serta terpeliharanya kepastian bagi dunia usaha. *Kedua*, melalui kebijakan sistem pembiayaan, inovasi alat pembayaran, kelancaran transaksi, industri yang sehat dan infrastruktur sistem pembayaran yang stabil menentukan perputaran uang (velositas), efisiensi, dan produktivitas dari berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, baik yang berbasis rekening maupun digital. Demikian pula, pengedaran uang kertas dalam jumlah yang cukup dan berkualitas sangat diperlukan masyarakat, termasuk di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). *Ketiga*, melalui kebijakan makroprudensial, pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan



Gambar 3.1. Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2025



Sumber: Bank Indonesia

yang optimal, didukung oleh terjaganya stabilitas sistem perbankan dengan sinergi erat dalam KSSK, berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan ketiga tugas tersebut, Bank Indonesia juga diberi kewenangan dalam pendalaman pasar uang dan kebijakan internasional, di samping turut serta dalam pengembangan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah.

Dalam melaksanakan ketiga tugasnya, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang optimal untuk keseimbangan antara terjaganya stabilitas dan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mempertimbangkan pula dampak dari perekonomian global. Bauran kebijakan dimaksud didasarkan pada asesmen, proyeksi, dan simulasi Bank Indonesia terhadap pergerakan siklus ekonomi dan keuangan nasional ke depan. Dalam hal ini, “stance” bauran kebijakan longgar ditempuh pada waktu siklus menurun dan di bawah kapasitas perekonomian potensial (“stagnan atau resesi”), dan sebaliknya “stance” kebijakan ketat pada waktu siklus menanjak di atas kapasitas potensial (“boom atau overheating”).

Sebagai contoh, dewasa ini siklus ekonomi dan keuangan Indonesia dalam tren meningkat tetapi masih berada di bawah kapasitas perekonomian potensial (Grafik 3.1.). Hal ini tecermin antara lain pada inflasi inti yang rendah, defisit transaksi berjalan yang kecil, dan pertumbuhan ekonomi yang belum meluas pada sebagian besar sektor ekonomi. Oleh karena itu, secara konsepsi “stance” bauran

Grafik 3.1. Siklus Ekonomi dan Siklus Keuangan Indonesia



Sumber: Bank Indonesia dan Consensus Indonesia



kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia cenderung longgar untuk keseimbangan pencapaian stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, sebagai negara dengan ekonomi terbuka, dampak rambatan gejala global berpengaruh pada stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional. Seperti dijelaskan sebelumnya, kebijakan tarif AS dan ketegangan geopolitik dunia berdampak pada tekanan instabilitas nilai tukar Rupiah dan aliran keluar portofolio investasi asing. Pertimbangan ini yang mendasari “stance” bauran kebijakan moneter lebih “*pro-growth and stability*”, sementara kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan makroprudensial tetap “*pro-growth*” dengan didukung oleh kebijakan pendalaman pasar uang dan program pengembangan inklusi ekonomi-keuangan.

Berdasarkan “stance” bauran kebijakan Bank Indonesia dimaksud, berikut ini pokok-pokok instrumen kebijakan yang ditempuh selama tahun 2025.

- i. **Di bidang kebijakan moneter, kebijakan Bank Indonesia ditempuh melalui penurunan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter.** Langkah ini ditempuh untuk optimalisasi trilema kebijakan moneter, yakni menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan kecukupan cadangan devisa.⁶ BI-Rate telah turun sebesar enam kali atau sebesar 150 bps sejak September 2024 menjadi 4,75%, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat dengan intervensi di pasar *off-shore* melalui *Non-Deliverable Forward* (NDF) dan intervensi di pasar domestik melalui pasar *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder. Ekspansi likuiditas

Rupiah juga ditempuh Bank Indonesia melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta pembelian SBN termasuk pembelian di pasar sekunder dan program *debt switching* sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah. Kebijakan moneter juga didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

- ii. **Di bidang kebijakan makroprudensial, insentif likuiditas ditingkatkan dan seluruh instrumen makroprudensial diperlonggar guna mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan.** Dalam kaitan ini, ketiga sasaran trilema kebijakan makroprudensial, yaitu kredit optimal, SSK, dan inklusi keuangan berjalan searah dan semakin diperkuat. Kebijakan KLM diperbesar untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas yang juga sejalan dengan program prioritas Pemerintah dalam Asta Cita. Instrumen Rasio Pinjaman Luar Negeri (RPLN) diperlonggar untuk memperluas alternatif pendanaan bank dari luar negeri. Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) juga dilonggarkan untuk memberikan tambahan ruang likuiditas melalui pengurangan rasio kewajiban surat berharga yang wajib dimiliki terhadap DPK. Instrumen kebijakan makroprudensial lainnya tetap dipertahankan longgar untuk mendorong penyaluran kredit, yaitu *Countercyclical Capital Buffer* (CcyB), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti, serta ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor. Surveilans makroprudensial dan pasar uang terhadap sistem perbankan juga diperkuat untuk turut menjaga SSK dengan koordinasi erat dalam KSSK.

⁶ Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia secara konsisten memberikan dukungannya antara lain melalui pengembangan klaster pangan. Penjelasan lebih rinci terkait hal ini dapat dilihat pada Boks 3.1. Pengembangan Klaster Pangan untuk Mendukung Stabilitas Harga.



iii. Di bidang kebijakan sistem pembayaran, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan kecukupan pengedaran uang terus ditempuh untuk mendukung kelancaran, efisiensi, dan produktivitas berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Digitalisasi ditempuh dengan inovasi instrumen dan perluasan layanan pembayaran digital, penguatan struktur industri dan stabilitas infrastruktur sistem pembayaran, serta integrasi ekosistem ekonomi-keuangan digital (EKD) nasional. Implementasi BSPI 2025 telah berhasil mencapai berbagai transformasi strategis di area sistem pembayaran, antara lain meluasnya akseptasi QRIS, implementasi BI-FAST, dan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang mendorong peningkatan velositas pembayaran dan efisiensi transaksi ritel. Transformasi digital sistem pembayaran dilanjutkan dalam BSPI 2030, dengan fokus pada penguatan ketahanan sistem pembayaran serta perluasan interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran, baik di tingkat domestik maupun internasional. Pada 2025, Bank Indonesia terus memperluas akseptasi digital melalui kebijakan skema harga QRIS yang lebih murah untuk *merchant* Badan Layanan Umum (BLU) dan *Public Service Obligation* (PSO). Dari sisi inovasi, fitur QRIS telah diperluas melalui peluncuran QRIS Tap (tanpa pindai) berbasis teknologi *Near Field Communication* (NFC). Struktur industri sistem pembayaran diperkuat untuk interkoneksi dan interoperabilitas antarpengyelenggara jasa pembayaran melalui perluasan implementasi SNAP serta penguatan kelembagaan industri melalui penguatan fungsi surveilans dan manajemen risiko, termasuk terhadap transaksi ilegal dan ancaman siber. Stabilitas infrastruktur sistem pembayaran terus dijaga melalui optimalisasi pemanfaatan fitur BI-FAST Fase I Tahap 2 yang mencakup layanan transfer secara kolektif (*bulk transfer*), pembayaran atas dasar permintaan (*request for payment*), dan

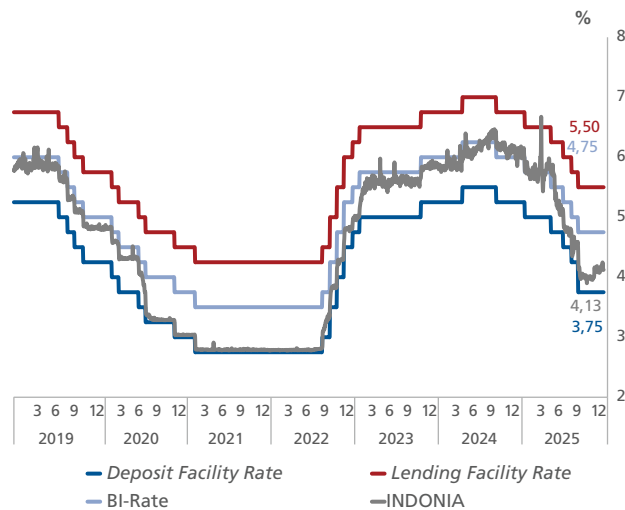
transfer debit secara langsung (*direct debit*). Sejalan dengan digitalisasi keuangan publik, Bank Indonesia memperkuat elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) serta peningkatan akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan tata kelola fiskal. Selain itu, sinergi internasional diperluas melalui implementasi *Regional Payment Connectivity* (RPC) di kawasan ASEAN dan pembukaan koridor kerja sama QRIS Antarnegara dengan negara mitra baru yaitu Indonesia-Jepang untuk memperkuat konektivitas lintas batas dan mendukung agenda integrasi ekonomi digital regional. Sementara itu, untuk menjaga kelancaran, efisiensi, dan produktivitas transaksi ekonomi dan keuangan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah dengan keterbatasan akseptasi serta infrastruktur digital, Bank Indonesia terus memastikan kecukupan dan meningkatkan kualitas uang Rupiah, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjamin ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.2. Kebijakan Moneter

Kebijakan suku bunga pada 2025 ditetapkan dalam setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan secara *forward-looking* dan *pre-emptive* untuk mengarahkan prakiraan inflasi dua tahun ke depan tetap terkendali dalam kisaran sasaran yang ditetapkan Pemerintah yaitu $2,5 \pm 1\%$ pada 2025 dan 2026. Sebagaimana dijelaskan di atas, penurunan suku bunga kebijakan moneter BI-Rate sebanyak 6 kali sebesar 150 bps dari 6,25% pada September 2024 menjadi 4,75% pada September 2025 dan ini menjadi tingkat BI-Rate terendah sejak 2022 (Grafik 3.2.). Penurunan BI-Rate itu diputuskan Bank Indonesia pada



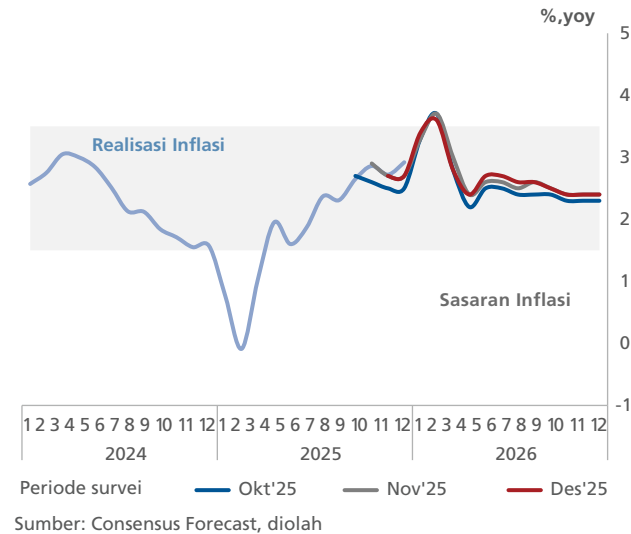
Grafik 3.2. BI-Rate dan INDONESIA



September 2024 dan selama tahun 2025 pada Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September 2025 masing-masing sebesar 25 bps. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Bank Indonesia pada 16-17 Desember 2025 juga memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 5,50% untuk terus mendorong peran perbankan dalam memanfaatkan pelonggaran likuiditas bagi sektor riil. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ (Grafik 3.3.), dan nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI-Rate dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah ditempuh untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi nasional dari dampak gejolak global. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental ditempuh melalui intervensi baik melalui transaksi *spot* dan DNDF di pasar domestik maupun transaksi NDF di pasar luar negeri. Strategi ini disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Nilai tukar Rupiah yang pada awal April

Grafik 3.3. Ekspektasi Inflasi



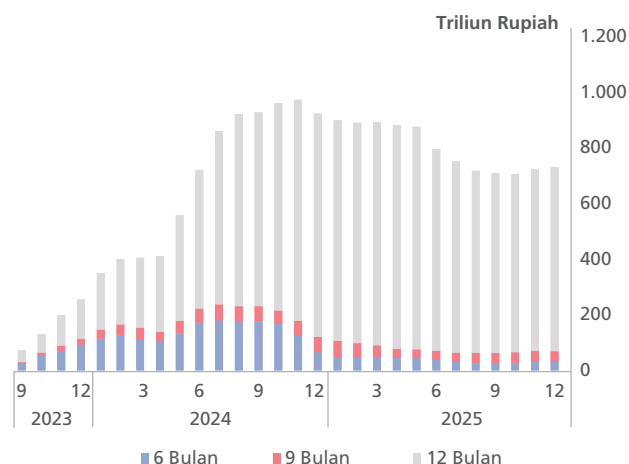
2025 pernah mencapai sekitar Rp17.000 per dolar AS, telah menguat dan stabil di sekitar Rp16.300-16.700 per dolar AS. Bank Indonesia berkomitmen kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sebagai bagian penting dari stabilitas perekonomian dan stabilitas NKRI.

Ekspansi likuiditas moneter melalui strategi operasi moneter *pro-market* guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. Strategi ini ditempuh dengan tiga langkah. *Pertama*, peningkatan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan penurunan posisi SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp730,90 triliun pada 31 Desember 2025 (Grafik 3.4.). *Kedua*, penurunan struktur suku bunga instrumen moneter dan *swap* valas sejalan dengan ekspansi likuiditas moneter dan untuk mempercepat efektivitas penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan. Suku bunga

Ekspansi likuiditas moneter melalui strategi operasi moneter *pro-market* memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas



Grafik 3.4. Perkembangan Posisi SRBI Berdasarkan Tenor

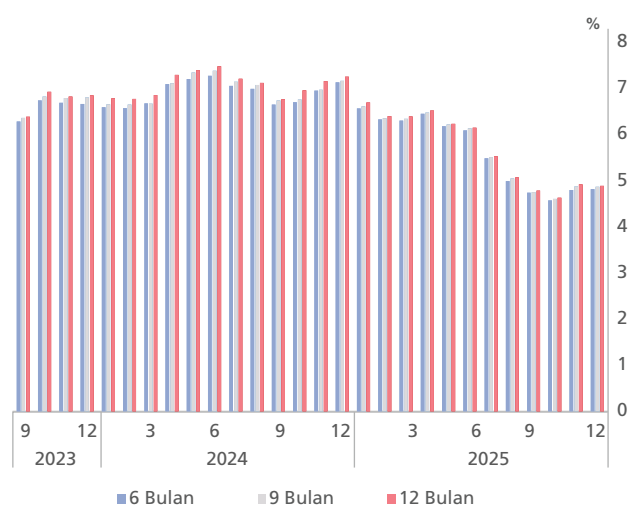


Data s.d 31 Des '25

Sumber: Bank Indonesia

SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan menurun masing-masing sebesar 231 bps, 230 bps, dan 235 bps sejak awal 2025 menjadi 4,85%; 4,90%; dan 4,92% pada 19 Desember 2025 (Grafik 3.5.). *Ketiga*, penguatan peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi *repurchase agreement* (repo) antarpelaku pasar. Selain itu, untuk memperkuat efektivitas ekspansi likuiditas moneter ini, seperti dikemukakan di atas, pada RDG 16-17 Desember 2025, suku bunga *deposit facility* Bank Indonesia dipertahankan 3,75% agar perbankan

Grafik 3.5. Perkembangan Suku Bunga SRBI Berdasarkan Tenor



Sumber: Bank Indonesia

lebih menggunakan kelebihan likuiditas untuk penyaluran kredit ke sektor riil guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen *pro-market*.⁷ Sejak November 2025, Bank Indonesia memperluas *underlying* repo dalam operasi moneter Bank Indonesia dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung BPPU 2030, Bank Indonesia juga menerbitkan BI-FRN (*Floating Rate Note*) dan pengembangan *Overnight Index Swap* (OIS) untuk tenor di atas *overnight* untuk membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang. Dalam rangka mendukung pasar uang syariah, Bank Indonesia juga memperluas investor Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) untuk dapat dimiliki oleh bank dan nonbank, termasuk bukan penduduk.

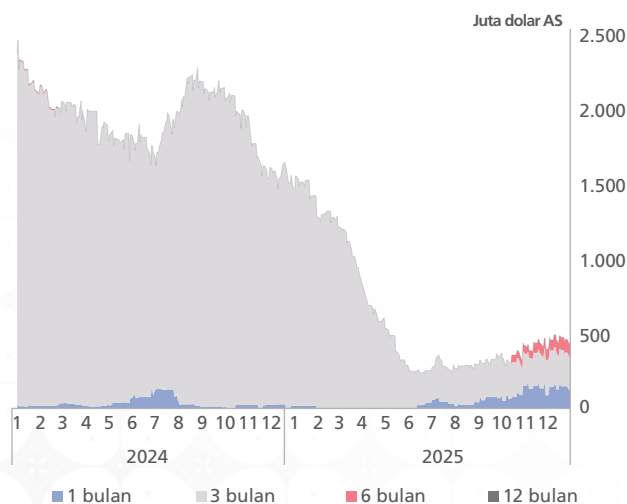
Pembelian SBN dari pasar sekunder dilakukan sejalan dengan kebijakan moneter ekspansif melalui penurunan suku bunga BI-Rate dan ekspansi likuiditas moneter. Hingga 31 Desember 2025, Bank Indonesia telah membeli Rp332,14 triliun sejak Januari 2025, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program *debt switching* dengan Pemerintah sebesar Rp246,68 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Selain itu, pembelian SBN dimaksud sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah untuk bersama menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, sebagian SBN dimaksud dipergunakan Pemerintah untuk pendanaan program ekonomi kerakyatan, seperti Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

⁷ Penjelasan lebih rinci mengenai inovasi strategi operasi moneter dapat dilihat pada Boks 3.2. Inovasi Strategi Operasi Moneter *Pro-Market* untuk Akselerasi Pendalaman dan Peningkatan Efisiensi Pasar Keuangan.



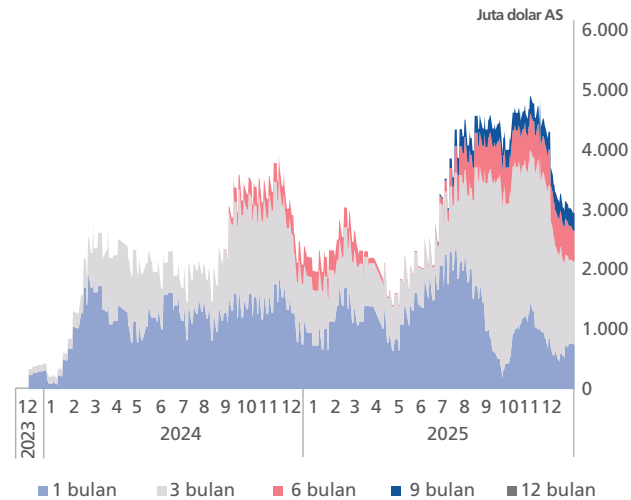
Ketiga instrumen moneter di atas, yaitu kebijakan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter didukung oleh kecukupan cadangan devisa dan pengelolaan lalu lintas devisa. Bank Indonesia senantiasa memastikan kecukupan cadangan sesuai standar internasional untuk mendukung pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Posisi cadangan devisa akhir Desember 2025 yang berjumlah 156,5 miliar dolar AS setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Lebih lanjut, untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia juga mendukung pelaksanaan kebijakan kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2025. Instrumen penempatan dan pemanfaatan DHE SDA diperluas meliputi antara lain penempatan di instrumen *Term Deposit* (TD) valas DHE sampai dengan tenor 12 bulan (Grafik 3.6.), dan penempatan di instrumen Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sampai dengan tenor 12 bulan (Grafik 3.7.). Selain melalui instrumen penempatan valas,

Grafik 3.6. Perkembangan Posisi TD Valas DHE Berdasarkan Tenor



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.7. Perkembangan Posisi SVBI Berdasarkan Tenor



Sumber: Bank Indonesia

ruang fleksibilitas pada PP No. 8 Tahun 2025 juga mendorong peningkatan konversi valas ke Rupiah. Hal ini mengakibatkan suplai valas dari korporasi meningkat, yang selanjutnya juga turut mendorong peningkatan DPK Rupiah korporasi.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam pengendalian inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait dengan pengendalian inflasi khususnya harga pangan (*volatile food*), sinergi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus dilakukan dengan dukungan penuh Bank Indonesia, baik dari kantor pusat maupun 46 kantor perwakilan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip pengendalian inflasi pangan mengacu kepada strategi 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun dukungan Bank Indonesia pada GNPIP melingkupi program Peningkatan Produktivitas, termasuk Kelembagaan Klaster Pangan, Ketahanan Pangan, Kerja sama Antar Daerah (KAD), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Operasi Pasar Murah, Digitalisasi Data, serta Koordinasi dan Komunikasi publik yang dilakukan secara intensif (Tabel 3.1.). Lebih lanjut, Bank Indonesia juga senantiasa mendukung berbagai upaya pengendalian harga yang dilakukan oleh

Pemerintah seperti program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) khususnya untuk komoditas beras serta pemantauan harga pangan secara intensif baik melalui rapat koordinasi di level TPID/TPIP secara berkala maupun kegiatan inspeksi baik di tingkat pasar maupun produsen. Berbagai upaya tersebut tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga pangan di jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem ketahanan pangan yang tangguh dan adaptif, di mana efisiensi rantai pasok, pemberdayaan daerah, dan koordinasi antar lembaga menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga. Selain di sisi pengendalian harga, Bank Indonesia juga terus mendukung

upaya Pemerintah, khususnya di daerah, untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah antara lain melalui penguatan *advisory* kebijakan ekonomi dalam mengoptimalisasi sektor potensial di tiap daerah, pemberdayaan UMKM, promosi investasi dan perdagangan daerah melalui Regional Investor Relation Unit (RIRU) serta keterlibatan aktif dalam Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED). Harapannya, dengan adanya sinergi tersebut mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah tinggi, inklusif, dan berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 3.1. Dukungan Bank Indonesia dalam GNPIP untuk Pengendalian Inflasi 2025

No.	Program Unggulan GNPIP	Target	Pencapaian	Satuan	Implementasi (% terhadap target)					
					Nasional	Sumatra	Jawa	Balinusra	Kalimantan	Sulampua
1	Peningkatan Produktivitas									
	a. Optimalisasi <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP)	125	678	Program	542,40%	600,00%	529,27%	362,50%	437,50%	608,00%
	b. Kelembagaan Klaster Pangan	75	300	Program	400,00%	221,05%	317,86%	240,00%	1.140%	330,77%
2	Penguatan Ketahanan Pangan									
	a. Replikasi <i>Best Practices</i>	127	222	Program	174,80%	177,14%	182,50%	137,50%	193,33%	162,07%
	b. Hilirisasi Pangan	115	178	Program	154,78%	105,88%	207,89%	100,00%	150,00%	159,09%
	c. Fasilitasi Kemitraan <i>Offtaker</i>	46	126	Program	273,91%	238,46%	307,14%	400,00%	333,33%	200,00%
3	Kerja Sama Antar Daerah	132	378	MoU	286,36%	331,58%	339,53%	211,11%	188,24%	220,00%
4	Fasilitasi Distribusi Pangan	226	1.690	Program	747,79%	863,93%	1.084,62%	600,00%	244,83%	368,18%
5	Pasar Murah	13.800	19.993	Pelaksanaan	144,88%	148,60%	155,42%	119,13%	137,50%	133,20%
6	Digitalisasi Data	66	108	Program	163,64%	130,00%	181,82%	320,00%	162,50%	118,18%
7	Koordinasi & Komunikasi									
	a. Koordinasi Kelembagaan	626	980	Kegiatan	156,55%	135,23%	180,58%	123,68%	126,83%	176,61%
	b. <i>Capacity Building</i> TPID	136	330	Program	242,65%	294,44%	259,57%	144,44%	212,50%	196,43%
	c. Pengendalian Ekspektasi	472	1.188	Program	251,69%	209,92%	192,81%	322,22%	259,38%	376,29%
	d. Diversifikasi & Olahan Pangan	175	282	Program	161,14%	119,15%	222,41%	150,00%	150,00%	128,95%
	e. Pemanfaatan Insentif KLM	73	144	Program	197,26%	104,76%	254,17%	200,00%	155,56%	264,29%

Sumber: PowerApps GNPIP

Data per 31 Desember 2025



Best Systemic and Prudential Regulator in Asia Pacific

Bank Indonesia



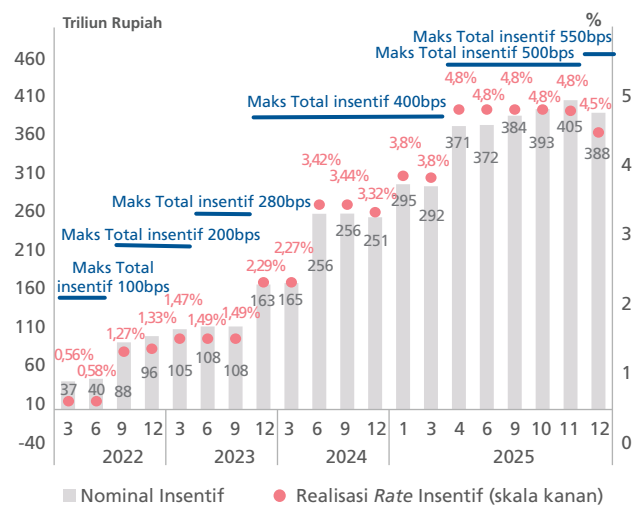
Bank Indonesia meraih penghargaan "The Best Systemic and Prudential Regulator in Asia Pacific Award 2025" dari The Asian Banker. Penghargaan ini menggarisbawahi keberhasilan kebijakan makroprudensial yang ditempuh Bank Indonesia.

3.3. Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia melakukan penguatan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk semakin mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas serta mendukung program Asta Cita Pemerintah. Inovasi pelonggaran kebijakan makroprudensial ini ditempuh sejak pertama kali diterapkan pada Maret 2022 sebagai bagian bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Insentif likuiditas diberikan kepada perbankan berupa pengembalian kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Bank Indonesia memandang pengembalian GWM dalam bentuk insentif likuiditas KLM tersebut lebih produktif bagi perekonomian, dibandingkan dengan penurunan kewajiban GWM kepada seluruh bank yang dapat saja dipergunakan untuk spekulasi nilai tukar atau penggunaan lain daripada untuk penyaluran kredit/pembiayaan bagi dunia usaha. Dengan pertimbangan ini, Bank Indonesia secara berkala mengevaluasi implementasi KLM

tersebut dan dari waktu ke waktu memperkuat efektivitasnya dalam mendorong perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan, baik dari aspek cakupan sektor maupun besaran insentifnya (Grafik 3.8.). Dari sisi cakupan sektor prioritas, KLM pada awal implementasinya disalurkan untuk mendukung pemulihan sektor yang mengalami luka memar (*scarring effect*) dari dampak pandemi COVID-19, yang kemudian diperluas ke sektor-

Grafik 3.8. Tahapan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)



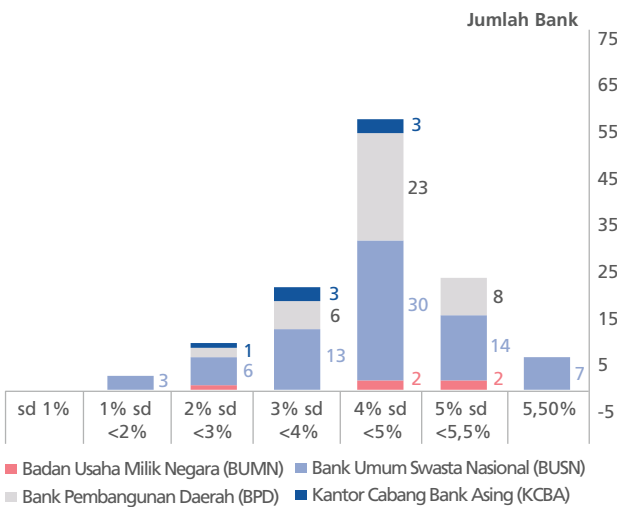
Sumber: Bank Indonesia

sektor yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, mendukung peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja, serta mendukung program Asta Cita Pemerintah dengan besaran insentif yang terus meningkat. Pada Desember 2025, kembali dilakukan penguatan insentif kebijakan KLM berbasis kinerja dan *forward-looking* yang terdiri dari *lending channel* dan *interest rate channel*. Besaran insentif likuiditas KLM ditingkatkan dari 5% menjadi 5,5% dari DPK. Penguatan KLM *lending channel* dilakukan untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan utamanya kepada sektor-sektor prioritas, yaitu (i) sektor pertanian, industri, dan hilirisasi; (ii) sektor jasa, termasuk sektor ekonomi kreatif; (iii) sektor konstruksi, real estat, dan perumahan; dan/atau (iv) sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan, yang juga menjadi sektor prioritas Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu insentif KLM *interest rate channel* juga diberikan kepada bank yang responsif terhadap penurunan suku bunga kebijakan.

Perbankan memanfaatkan insentif likuiditas KLM untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hingga akhir Desember 2025, total insentif KLM mencapai Rp388,06 triliun, yang disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp177,1 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp169,5 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp34,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp7 triliun. Secara keseluruhan, sebanyak 124 bank telah menerima insentif likuiditas KLM tersebut dalam jumlah yang besar, yaitu antara 4-5% dan lebih dari 5% dari DPK masing-masing sebanyak 58 bank dan 31 bank penerima (Grafik 3.9.). Dari sisi

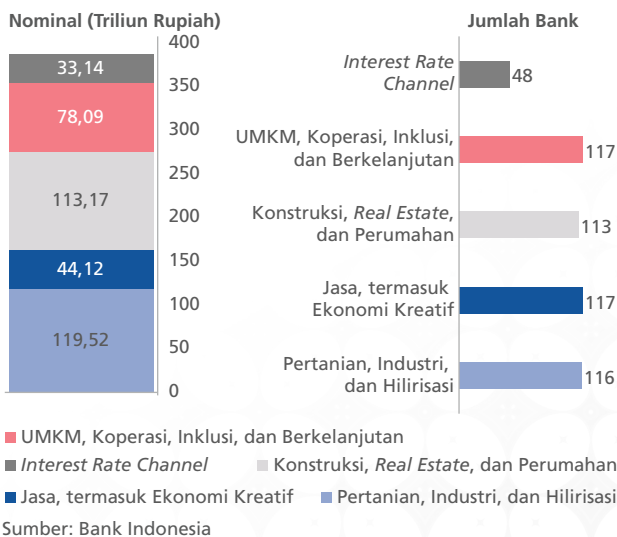
Bank Indonesia menerapkan kebijakan insentif KLM berbasis kinerja dan berorientasi ke depan yang terdiri dari *lending channel* dan *interest rate channel*

Grafik 3.9. Jumlah Bank Penerima KLM



sektor-sektor prioritas pada insentif KLM *lending channel*, seperti tergambar pada Grafik 3.10., insentif KLM terbesar disalurkan untuk kredit/pembiayaan pada sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi (Rp119,52 triliun), disusul sektor Konstruksi, Real Estat, dan Perumahan (Rp113,17 triliun), pembiayaan inklusif UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan (Rp78,09 triliun), dan Sektor Jasa termasuk Ekonomi kreatif (Rp44,12 triliun). Sementara insentif KLM *interest rate channel* mencapai sebesar Rp33,14 triliun. Pemberian insentif likuiditas KLM dinilai efektif untuk mendorong perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Grafik 3.10. Penyaluran KLM per Sektor Prioritas





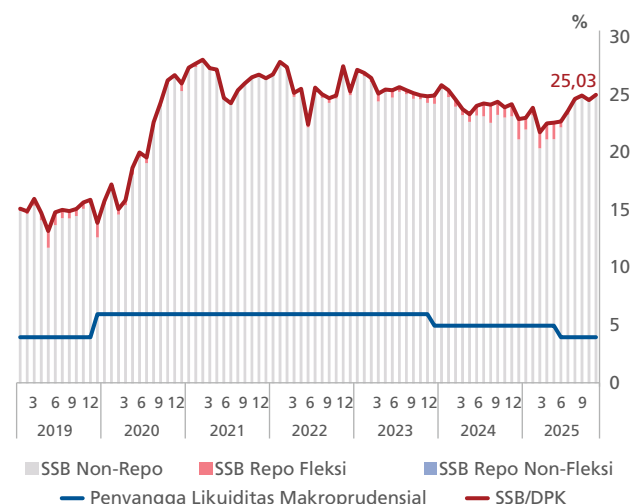
Ke depan, Bank Indonesia akan secara berkala melakukan asesmen terhadap kecepatan bank menyesuaikan suku bunga kredit terhadap perubahan suku bunga kebijakan, serta cakupan sektor-sektor prioritas agar sejalan dengan program-program Pemerintah dan penciptaan lapangan kerja.

Bank Indonesia melakukan penguatan instrumen Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk mendorong pendanaan perbankan dalam rangka mengoptimalkan manajemen likuiditas dan penyaluran kredit perbankan. Kebijakan RPLN merupakan inovasi instrumen makroprudensial kontrasiklikal untuk memperkuat pendanaan luar negeri jangka pendek bank sesuai dengan kebutuhan perekonomian. RPLN mengatur batas maksimum kewajiban jangka pendek bank terhadap modal. Kewajiban jangka pendek yang diperhitungkan dalam RPLN terdiri atas utang luar negeri bank jangka pendek, Surat Utang Valas Domestik jangka pendek, dan/atau Transaksi Partisipasi Risiko jangka pendek. RPLN memiliki dua fitur kebijakan, yaitu kontrasiklikal (*countercyclical*) dan pendekatan berbasis risiko (*Risk-based approach*). Batasan RPLN bersifat dinamis melalui penetapan parameter kontrasiklikal dengan mempertimbangkan siklus perekonomian makro dan keuangan serta siklus utang luar negeri (ULN) bank secara industri, yang dievaluasi secara berkala. Menggunakan *Risk-based approach*, penerapan parameter kontrasiklikal RPLN memperhitungkan risiko eksternal dan risiko makrofinansial, termasuk penerapan prinsip kehati-hatian yang mencakup kapasitas permodalan, risiko kredit, dan risiko pasar. Efektif per 1 Juni 2025, Bank Indonesia menetapkan parameter kontrasiklikal sebesar 5%, sehingga batas maksimum RPLN meningkat dari semula 30% menjadi 35%.⁸ Penerapan parameter kontrasiklikal ini dapat meningkatkan potensi sumber likuiditas perbankan sesuai dengan kebutuhan perekonomian nasional, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

⁸ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri.

Bank Indonesia terus menjaga kecukupan likuiditas perbankan, termasuk fleksibilitas rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), untuk memperkuat kredit/pembiayaan dan sekaligus turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Seperti dijelaskan sebelumnya, kondisi likuiditas perbankan yang longgar tercermin pada rasio AL/DPK dan LDR, masing-masing sebesar 28,57% dan 85,35% pada Desember 2025. Dalam rangka memperkuat fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan, Bank Indonesia melonggarkan rasio PLM, yaitu kewajiban bank untuk menyimpan sebagian Alat Likuid dimaksud pada Surat-Surat Berharga (SSB) yang berkualitas seperti SBN. Pada 1 Juni 2025, Bank Indonesia menurunkan rasio PLM dari 5% menjadi 4% untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dan rasio PLM Syariah dari 3,5% menjadi 2,5% untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS)⁹ (Grafik 3.11.). Selain penurunan rasio pada kebijakan PLM, Bank Indonesia juga menyesuaikan fitur fleksibilitas *repurchase agreement* (repo) dalam kebijakan PLM/PLM Syariah. Fitur fleksibilitas repo surat berharga untuk pemenuhan PLM bagi BUK diturunkan menjadi 4% dari sebelumnya sebesar 5%, sementara fleksibilitas repo surat berharga syariah untuk pemenuhan PLM Syariah bagi BUS

Grafik 3.11. Rasio PLM Perbankan



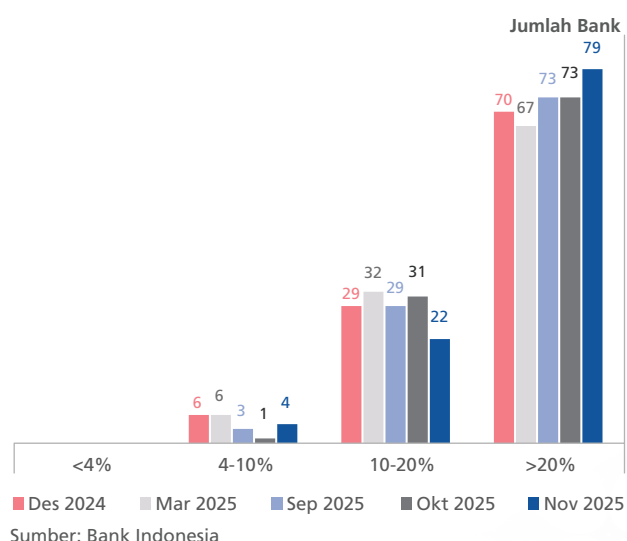
Sumber: Bank Indonesia

⁹ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

diturunkan menjadi 2,5% dari sebelumnya 3,5%. Penyesuaian ini memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi perbankan dalam mengelola likuiditas melalui transaksi repo atas surat berharga yang dimiliki bank dalam rangka pemenuhan kewajiban PLM/PLM Syariah. Pada November 2025, seluruh bank mempunyai rasio PLM di atas 5% dari DPK, dan bahkan sebanyak 79 bank dengan rasio PLM di atas 20% dan 22 bank dengan rasio PLM antara 10-20% (Grafik 3.12.). Hampir seluruh SSB untuk pemenuhan rasio PLM itu disimpan oleh perbankan, dan hanya sedikit saja direpokan ke Bank Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan kondisi likuiditas perbankan yang longgar sehingga mendukung penyaluran kredit/pembiayaan bagi perekonomian. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, perbankan cenderung menempatkan kelebihan likuiditas pada SSB sebagai alternatif penempatan dana di tengah belum kuatnya permintaan kredit dari dunia usaha yang memenuhi persyaratan. Ke depan, dengan semakin meningkatnya pemulihan ekonomi nasional, kredit/pembiayaan perbankan diperkirakan juga akan tumbuh lebih tinggi.

Kebijakan makroprudensial longgar tetap dipertahankan untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di samping perluasan cakupan sektor prioritas dan peningkatan insentif likuiditas KLM, juga dilakukan penguatan RPLN dan fleksibilitas rasio PLM. Bank Indonesia melanjutkan berbagai instrumen kebijakan makroprudensial longgar

Grafik 3.12. Distribusi Rasio PLM Perbankan



yang telah ditempuh sebelumnya. Kebijakan rasio pembiayaan terhadap nilai obyek yang dibiayai (*loan to value/financing to value, LTV/FTV*) tetap sebesar 100% untuk semua jenis properti (termasuk perumahan rakyat) dan perpanjangan ketentuan uang muka 0% untuk penyaluran kredit/pembiayaan kendaraan bermotor. Demikian pula, Bank Indonesia mempertahankan rasio CCyB sebesar 0% dan RIM sebesar 84-94% (realisasi RIM hingga minggu pertama Desember 2025 sebesar 83,95%) untuk fleksibilitas permodalan serta likuiditas penyaluran kredit perbankan, melanjutkan penerapan rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendukung ekonomi-keuangan inklusif khususnya UMKM, serta kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan suku bunga dan makroprudensial.

Bank Indonesia terus memperkuat surveilans makroprudensial dan pasar uang terhadap sistem perbankan untuk turut memelihara stabilitas sistem keuangan. Surveilans makroprudensial (*macroprudential surveillance*) difokuskan pada keterkaitan makroekonomi-finansial terhadap bank-bank besar yang berperan penting dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan. Surveilans dimaksud diarahkan pada penilaian risiko likuiditas, risiko pasar (suku bunga dan nilai tukar), dan risiko kredit, yang dapat muncul dari dinamika makroekonomi baik domestik maupun global. Asesmen risiko dilakukan terhadap individu bank-bank besar tersebut dan disertai dengan analisis mengenai keterkaitan antarbank dalam sistem perbankan, baik yang bersifat dalam jangka pendek (*cross-section*) maupun secara dinamis untuk dua tahun ke depan (*forward looking*). Uji ketahanan (*stress-test*) atas ketiga jenis risiko tersebut didasarkan pada skenario makroekonomi Indonesia yang telah mempertimbangkan dinamika perekonomian global. Sementara itu, surveilans pasar (*market surveillance*) diarahkan untuk menilai berbagai risiko perbankan, yang berasal dari aktivitas transaksi dan interkoneksi bank-bank besar di pasar uang dan pasar valas. Selain penilaian risiko transaksi dan interkoneksi di atas, surveilans makroprudensial dan pasar



juga mencakup penilaian atas kapabilitas SDM, manajemen risiko, dan teknologi dari bank-bank besar dimaksud. Kedua jenis surveilans ini merupakan implementasi dari UU P2SK yang memperkuat mandat Bank Indonesia atas kebijakan makroprudensial serta pendalaman pasar uang dan pasar valas. Hasil surveilans dimaksud menjadi pertimbangan penting dalam perumusan bauran kebijakan Bank Indonesia serta bagian dari koordinasi pengawasan secara bilateral dengan OJK dan koordinasi menjaga stabilitas sistem keuangan dalam KSSK.

Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan berbagai otoritas terus ditingkatkan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selama tahun 2025, KSSK mengadakan rapat secara berkala setiap triwulan, dan sewaktu-waktu lain apabila diperlukan. Koordinasi bersama KSSK ditujukan untuk melakukan asesmen bersama kondisi dan koordinasi kebijakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Secara keseluruhan, kondisi SSK terjaga dan berdaya tahan dalam menghadapi tekanan baik dari global dan domestik. Bank Indonesia turut menjaga SSK melalui upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, pertumbuhan kredit/pembiayaan yang optimal, surveilans pada bank-bank besar khususnya atas risiko likuiditas dan risiko pasar, serta stabilitas sistem pembayaran. Uji ketahanan (*stress test*) dan koordinasi untuk pencegahan dan penanganan kemungkinan terjadinya krisis dilakukan bersama-sama dengan KSSK. KSSK juga berkoordinasi dalam merumuskan peraturan dan ketentuan yang perlu dikeluarkan sebagai implementasi dari UU P2SK. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah menerbitkan 16 dari 17 Peraturan Bank Indonesia (PBI) hingga akhir Desember 2025, dengan sisanya akan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Bank Indonesia juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai otoritas dan forum internasional di bidang makroprudensial dan SSK, sebagai bagian dari upaya mendukung penguatan SSK domestik yang berkontribusi pada ketahanan sistem keuangan global. Komitmen tersebut tecermin melalui peran aktif Bank Indonesia dalam berbagai forum strategis internasional seperti *Financial Stability Board (FSB)* dan *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*. Bank

Indonesia juga memperkuat peran kepemimpinan di kawasan Asia Pasifik melalui penugasan sebagai Ketua *Working Group on Banking Supervision (WGBS)* dalam forum *Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP)* untuk periode 2024–2026. Dalam kapasitas sebagai Ketua WGBS, Bank Indonesia secara aktif mendorong pembahasan isu-isu strategis, seperti penguatan pengawasan sektor keuangan, digitalisasi perbankan, serta asesmen risiko iklim yang semakin relevan terhadap stabilitas sistem keuangan. Sebagai hasil dari upaya dan peran aktif tersebut, Bank Indonesia mendapatkan penghargaan *The Best Systemic and Prudential Regulator in Asia Pacific Award 2025* diraih Bank Indonesia dari *The Asian Banker*.

3.4. Kebijakan Sistem Pembayaran

Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus ditempuh dengan inovasi instrumen dan perluasan layanan pembayaran digital untuk memperkuat integrasi ekosistem ekonomi-keuangan digital (EKD) nasional.¹⁰ Penggunaan QRIS sebagai satu-satunya standar nasional QR transaksi ekonomi-keuangan digital di Indonesia terus diperluas dengan kampanye akseptasi secara luas dan pengembangan inovasi fitur-fitur kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Kampanye perluasan akseptasi QRIS pada 2025 dilakukan secara luas baik di tingkat nasional maupun di berbagai daerah melalui 46 kantor-kantor Bank Indonesia. Inovasi fitur QRIS terus dilakukan Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) berupa standar nasional QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP), khususnya dalam mendukung layanan publik dan transaksi ritel secara digital. Untuk semakin meningkatkan transaksi pembayaran digital bagi ekonomi kerakyatan, Bank Indonesia pada 2025 terus memberikan insentif berupa perluasan akseptasi digital sebagai komitmen Bank Indonesia untuk mendukung penyediaan layanan umum Pemerintah kepada masyarakat melalui kebijakan skema harga QRIS untuk kriteria *merchant*

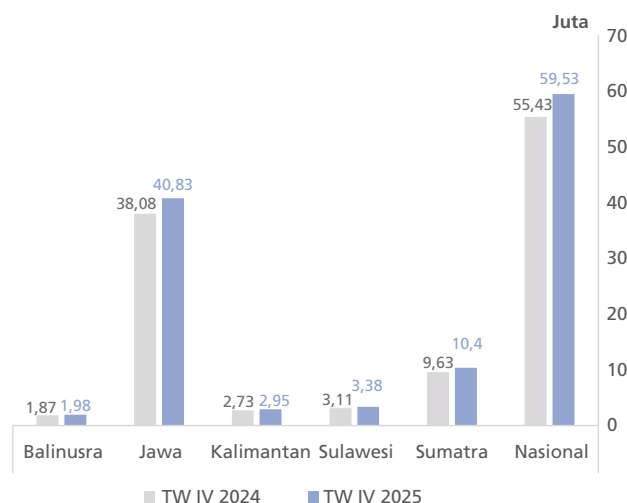
¹⁰ Penjelasan lebih rinci mengenai inovasi di bidang sistem pembayaran dapat dilihat pada Boks 3.3. Hackathon: Pengembangan *Digital Talent* untuk Mendorong Inovasi Dalam Ekosistem Ekonomi-Kuangan Digital.



Badan Layanan Umum (BLU) dan *Public Service Obligation* (PSO) dari 0,4% menjadi 0%. Hingga triwulan IV 2025, pengguna QRIS telah mencapai 59,53 juta dari target 58,0 juta dengan 42,75 juta *merchant*, yang sebagian besar UMKM. Dari sisi wilayah (Grafik 3.13.), pengguna QRIS sebagian besar di Jawa yang mencapai 40,83 juta yang diikuti Sumatra (10,40 juta), Sulawesi, Maluku dan Papua (3,38 juta), Kalimantan (2,95 juta) dan Bali-Nusa Tenggara (1,98 juta). Akselerasi transaksi QRIS juga berlanjut dengan peningkatan volume sebesar 139,99% (yoy) dan nominal 107,22% (yoy)-(Grafik 3.14.). Semakin populernya QRIS bagi masyarakat menunjukkan semakin besarnya manfaat dari akselerasi digitalisasi sistem pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

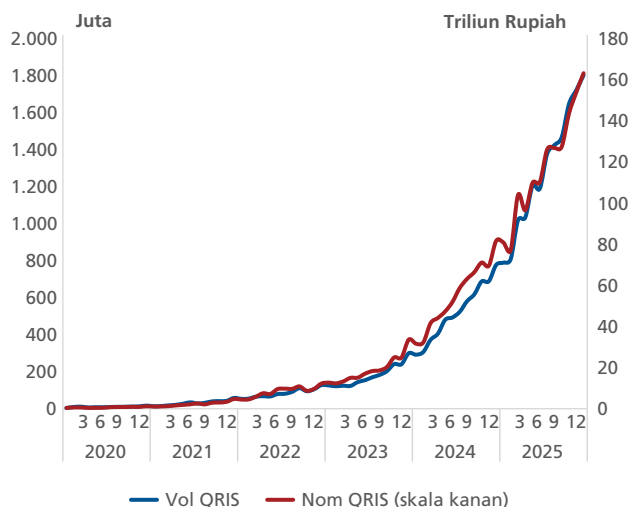
Perluasan akseptasi dan stabilitas BI-FAST ditingkatkan sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel yang semakin digemari masyarakat. Seperti diketahui, untuk memenuhi kebutuhan transaksi ritel yang terus berkembang pesat, BI-FAST mulai diimplementasikan sejak tahun 2022 sebagai infrastruktur pembayaran ritel yang bersifat *national driven*, memiliki fitur serta merta (*real time*), dan beroperasi tanpa henti (24/7). Bank Indonesia juga menyediakan berbagai kemudahan, termasuk kepesertaan yang terbuka, opsi penyediaan infrastruktur baik secara independen maupun bersama (*sharing*),

Grafik 3.13. Jumlah Pengguna QRIS per Wilayah



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.14. Perkembangan QRIS: Volume dan Nominal Transaksi

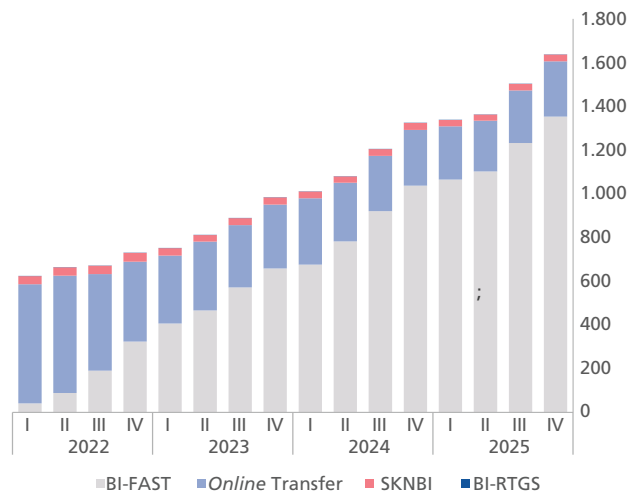


Sumber: Bank Indonesia

penetapan batas maksimal transaksi Rp250 juta per transaksi, serta skema harga BI-FAST sebesar maksimal Rp2.500 per transaksi kepada nasabah dengan biaya Bank Indonesia ke peserta Rp19 per transaksi. Pembukaan layanan fitur BI-FAST Fase I Tahap 2 turut dioptimalkan mencakup layanan transfer secara kolektif (*bulk transfer*), pembayaran atas dasar permintaan (*request for payment*), dan transfer debit secara langsung (*direct debit*) untuk mendukung layanan ekonomi dan keuangan digital. Hingga triwulan IV 2025, volume transaksi layanan sistem pembayaran ritel di bawah Rp250 juta melalui BI-FAST mencapai 1.358,65 juta transaksi atau mencakup 82,6% dari volume transaksi pembayaran ritel (Grafik 3.15). Nominal per transaksi BI-FAST umumnya dalam jumlah yang kecil, yaitu di bawah Rp500 ribu per transaksi, yang mencakup sekitar 59,6% dari total seluruh segmen transaksi (Grafik 3.16) Perkembangan ini menunjukkan BI-FAST semakin mampu memberikan layanan pembayaran digital yang semakin inklusif kepada masyarakat dan mendorong kerja sama layanan pembayaran. Dengan semakin meluasnya akseptasi masyarakat, Bank Indonesia terus memperkuat stabilitas layanan BI-FAST secara *end-to-end*, dari sisi stabilitas infrastruktur sistem pembayaran di Bank Indonesia, teknologi dan manajemen risiko di Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP), hingga layanan dari PSP kepada masyarakat. Aspek perlindungan konsumen, keamanan dari transaksi



Grafik 3.15. Perkembangan Volume Transaksi BI-FAST vs Pembayaran Ritel Lain

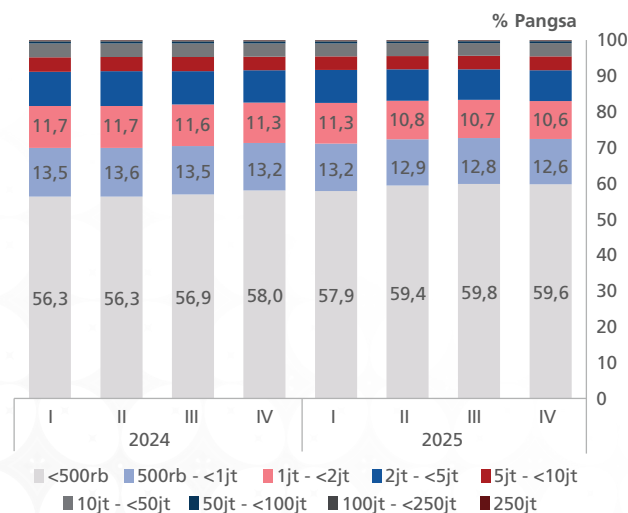


Sumber: Bank Indonesia

ilegal, dan keandalan teknologi dari keamanan siber menjadi perhatian utama dalam kebijakan dan pengawasan Bank Indonesia.

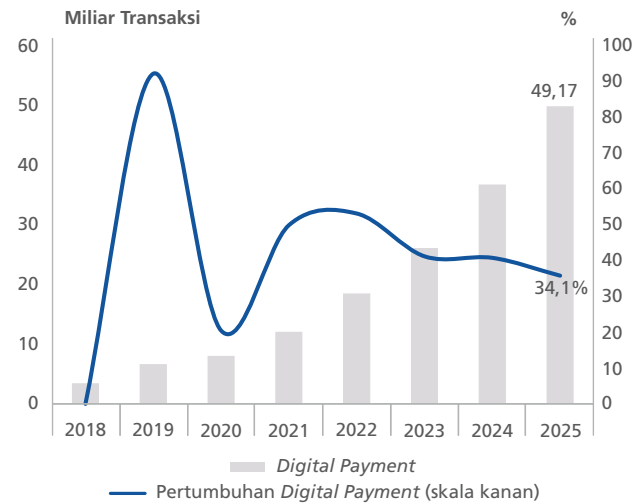
Layanan sistem pembayaran digital oleh perbankan dan PSP nonbank meningkat pesat dengan interkoneksi layanan antarpelaku yang semakin tinggi. Layanan pembayaran secara digital (*digital payments*) pada 2025 mencapai 49,76 miliar transaksi dengan nilai sekitar Rp80,77 triliun (Grafik 3.17). Perkembangan pesat ini menunjukkan semakin luasnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam menggunakan layanan pembayaran digital yang memberikan

Grafik 3.16. Perkembangan Volume BI-FAST per Kelompok Nominal Transaksi



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.17. Perkembangan Volume Transaksi Digital Payment

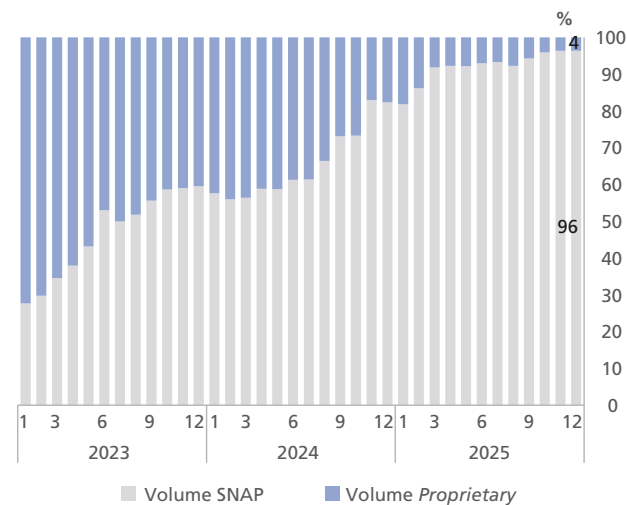


Sumber: Bank Indonesia

kenyamanan dalam berbagai transaksi ekonomi dan keuangan secara cepat, mudah dan murah. Dalam kaitan ini, untuk semakin memudahkan transaksi pembayaran digital bagi masyarakat dan sekaligus memperkuat struktur industri sistem pembayaran, penerapan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) terus diperluas untuk mendukung interkoneksi layanan perbankan digital antara bank dengan *fintech*. Setelah penerapan SNAP pada partisipasi *first movers* dan *second movers* pada tahun 2022 dan 2023, Bank Indonesia bekerja sama dengan ASPI pada tahun 2025 telah mengoptimalkan upaya perluasan integrasi adopsi SNAP pada segmen UMKM dan Nirlaba. Adopsi SNAP dalam interkoneksi layanan pembayaran oleh industri sistem pembayaran juga menunjukkan perkembangan signifikan, yaitu mencapai sekitar 96% dari volume transaksi pembayaran (Grafik 3.18.). Untuk memperkuat struktur industri PSP agar semakin sehat, efisien, stabil, Bank Indonesia terus memperkuat surveilans sistem pembayaran, baik dari sisi kompetensi SDM, manajemen risiko, maupun keandalan teknologi yang dipergunakan. Hasil dari surveilans ini menjadi dasar penentuan kesehatan dan klasifikasi PSP dalam kepesertaan pada BI-FAST, perizinan, dan pengembangan layanan pembayaran kepada masyarakat.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam elektronifikasi penyaluran bantuan sosial dan transaksi keuangan Pemerintah. Kelancaran

Grafik 3.18. Pangsa Volume Transaksi Antarpelaku melalui SNAP



Sumber: Bank Indonesia

penyaluran Bantuan Sosial Nontunai (BSNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terus dijaga melalui koordinasi/fasilitasi, sosialisasi/ edukasi, dan monitoring dengan melibatkan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Implementasi dan akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah terus diperluas untuk mendukung efisiensi transaksi keuangan Pemerintah dan keuangan inklusif. KKI segmen Pemerintah yang diluncurkan pada Agustus 2022 ini merupakan skema kartu kredit nasional untuk domestik yang dimulai dari transaksi segmen Pemerintah dan telah menjangkau transaksi ritel. Setelah sukses mengintegrasikan QRIS ke dalam KKI segmen Pemerintah, Bank Indonesia pada 2025 fokus pada upaya mendorong penggunaan KKI segmen kartu kredit untuk memperluas

akseptasinya. Dengan berbagai manfaat tersebut dan disertai konsistensi Bank Indonesia bersama ASPI untuk memperkuat implementasi dan akseptasi KKI segmen Pemerintah, jumlah Pemerintah Daerah yang berpartisipasi terus meningkat. Demikian pula, transaksi KKI terus meningkat baik secara volume maupun nominal transaksi, yang didominasi transaksi oleh Pemda melalui fitur QRIS. Transaksi KKI banyak dilakukan pada sektor transportasi dan hotel. Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga terus diperluas bersama Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) melalui pembentukan forum katalis P2DD. Di samping itu, sinergi dengan kementerian/lembaga dan otoritas lainnya terus dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) pada Oktober 2025.

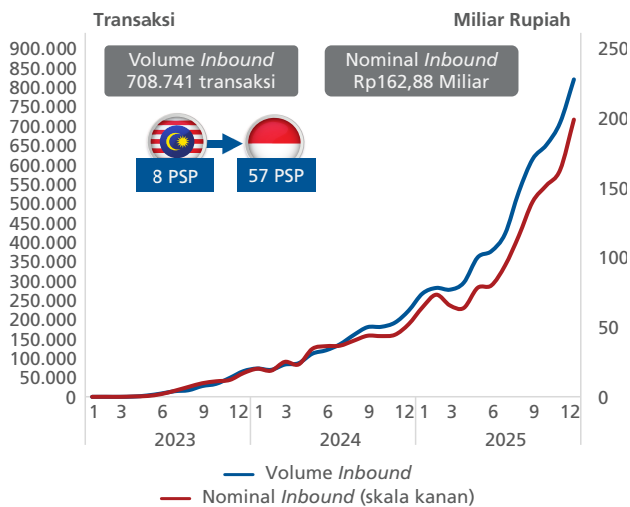
Bank Indonesia terus memperluas kerja sama pembayaran antarnegara melalui implementasi inisiatif *Regional Payment Connectivity (RPC)* di ASEAN dan sejumlah negara mitra ekonomi penting Indonesia lainnya. Perluasan kerja sama pembayaran berbasis QR code lintas negara saat ini telah diimplementasikan antara Bank Indonesia dengan Bank of Thailand (BoT) dan Bank Negara Malaysia (BNM), Monetary Authority of Singapura (MAS), dan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang. Perkembangan menunjukkan semakin banyak penduduk kedua negara menggunakan QR untuk kemudahan bertransaksi, khususnya transaksi ritel untuk pariwisata. Sebagai contoh, kerja



QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bersamaan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-80.



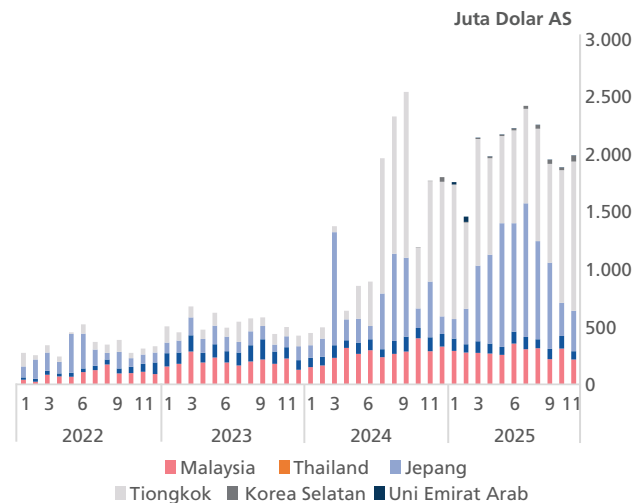
Grafik 3.19. Perkembangan Volume Transaksi Inbound QRIS Cross Border Indonesia-Malaysia



Sumber: Bank Indonesia

sama QR antara Bank Indonesia dengan BNM dewasa ini difasilitasi oleh 8 PSP dari Malaysia dan 57 PSP dari Indonesia, dengan penggunaan di Indonesia berjumlah sekitar 708 ribu transaksi dan dengan nilai sekitar Rp162,88 miliar (Grafik 3.19.). Pada tahun 2025, pembukaan koridor kerja sama QRIS Antarnegara dengan negara mitra baru yaitu Indonesia-Jepang telah dilakukan untuk memperkuat konektivitas lintas batas. Perluasan kerja sama QRIS Antarnegara akan terus dilakukan dengan negara mitra lainnya, termasuk inisiasi perluasan kerja sama dengan Tiongkok, Korea Selatan, India, dan Arab Saudi untuk mendorong pembayaran lintas negara yang lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih inklusif, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung aktivitas perekonomian, termasuk sektor pariwisata, serta mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi bilateral dalam Kerangka *Local Currency Transaction* (LCT). Hingga November 2025, penggunaan LCT mencapai ekuivalen 22,2 miliar dolar AS, meningkat 53,3% yoy dari periode yang sama pada 2024 sebesar 14,5 miliar dolar AS. Penggunaan LCT terbesar tercatat pada kerja sama Indonesia dengan Tiongkok, disusul dengan Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan selanjutnya Uni Emirat Arab (Grafik 3.20.).

Grafik 3.20. Perkembangan Local Currency Transaction (LCT)



Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia juga melanjutkan pengembangan Rupiah Digital dalam “Proyek Garuda”, untuk memastikan Rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia dalam era digital. Hal ini juga merupakan pelaksanaan amanat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menetapkan Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan mata uang Rupiah di Indonesia. Setelah mendapatkan berbagai masukan dari industri dan asosiasi, kementerian/lembaga, akademisi, dan masyarakat, dewasa ini Bank Indonesia dalam proses eksperimentasi teknologi melalui *proof of concept* (POC), dengan fokus pada penerbitan dan pengedaran Rupiah Digital. Saat ini, pengujian atas alternatif solusi teknologi sedang dilakukan Bank Indonesia, dengan pilihan antara sentralisasi dengan desentralisasi, serta dengan mempertimbangkan antara kecepatan dan keamanan penerbitan Rupiah Digital ke depan. *Output* POC ini akan menjadi landasan bagi proses selanjutnya berupa *sandboxing*, *piloting*, dan *prototyping* pada pengembangan tahap I (*immediate*) yang fokus pada pengedaran Rupiah Digital dari Bank Indonesia ke bank-bank yang akan ditunjuk sebagai *wholesaler*, sekaligus titik awal bagi pengembangan Rupiah Digital tahap berikutnya (*intermediate*) untuk penggunaan Rupiah Digital dalam sekuritas keuangan digital (aset keuangan digital).



Di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia terus melanjutkan transformasi pengelolaan uang Rupiah berlandaskan pada *Blueprint* Pengelolaan Uang Rupiah (BPPUR) 2030, dengan tema modern, kolaboratif, dan *sustainable*. Implementasi transformasi tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain ketersediaan uang Rupiah, pengedaran uang Rupiah, serta infrastruktur pengelolaan uang Rupiah. Penguatan pada aspek ketersediaan uang Rupiah dilakukan melalui penguatan akurasi perhitungan estimasi kebutuhan uang Rupiah, pengelolaan persediaan uang Rupiah yang lebih optimal, serta penguatan kualitas bahan dan desain uang Rupiah guna menjamin peredaran uang yang semakin berkualitas dan berkelanjutan. Pada aspek pengedaran uang Rupiah, peningkatan efisiensi sistem distribusi ditempuh melalui optimalisasi rute distribusi dengan memanfaatkan perkembangan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah yang semakin baik, serta implementasi *business process reengineering* pengedaran uang Rupiah. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas proses pengedaran uang Rupiah yang berdampak pada efisiensi sumber daya. Sinergi dan kolaborasi dengan mitra strategis juga terus diperkuat untuk memperluas jangkauan layanan, memastikan ketepatan waktu, serta menjaga keamanan distribusi uang Rupiah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Optimalisasi pengedaran uang Rupiah juga dilakukan melalui pengembangan Sentra Kas Mitra dan Mitra

Layanan. Infrastruktur pengelolaan uang Rupiah (PUR) yang modern terus diperkuat melalui pengembangan *Digital Smart Cash Management* sebagai bagian dari digitalisasi ekosistem PUR yang terintegrasi. Inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan proses perencanaan, *monitoring*, pemantauan, serta pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis data yang kuat.

Bank Indonesia terus memperluas layanan kepada masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan uang Rupiah yang berkualitas di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari upaya memperluas layanan untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah kepada masyarakat, Bank Indonesia senantiasa melaksanakan kas keliling di berbagai wilayah termasuk di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Pelaksanaan layanan kas keliling di daerah 3T dilakukan melalui program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) yang pada tahun ini telah menjangkau 90 pulau 3T di 18 provinsi. Seluruh upaya tersebut mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat misi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan uang Rupiah yang berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di penjuru negeri dan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara. Selain pelaksanaan ERB, Bank Indonesia juga menyelenggarakan program tahunan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2025. Program ini merupakan bentuk nyata komitmen Bank



Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2025 dengan tema – “Uang Logam, Kecil Nilainya - Besar Manfaatnya”, diselenggarakan pada 15–17 Agustus 2025.



Indonesia dalam memastikan tersedianya uang Rupiah dalam kondisi layak edar, dengan jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai, serta didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Realisasi *outflow* SERAMBI 2025 tercatat sebesar Rp161,3 triliun. SERAMBI 2025 dilakukan melalui berbagai kanal layanan penukaran. Secara nasional, sebanyak 6.897 titik layanan telah dihadirkan, terdiri dari 4.141 titik layanan perbankan dan 2.756 titik layanan langsung oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga mendorong penerapan pengelolaan uang Rupiah yang berkelanjutan. Komitmen terhadap prinsip keberlanjutan (*green commitment*) diwujudkan oleh Bank Indonesia melalui program Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) Berkelanjutan, yang mencakup seluruh siklus pengelolaan uang mulai dari pencetakan, pengedaran, hingga pemusnahan uang Rupiah. Pada aspek pencetakan, Bank Indonesia memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan melalui penguatan *life cycle* uang Rupiah. Upaya ini diwujudkan dengan penggunaan *durable paper* dalam proses desain dan pencetakan uang Rupiah, guna meningkatkan ketahanan fisik sekaligus memperpanjang usia edar uang. Pada aspek pengedaran, komitmen hijau diwujudkan melalui implementasi penggunaan kendaraan ramah lingkungan, baik yang berstandar Euro 4 atau Euro 5, maupun kendaraan *hybrid*, untuk mendukung distribusi uang yang efisien dan rendah emisi. Sementara itu, pada aspek pemusnahan uang Rupiah, Bank Indonesia menerapkan konsep ekonomi sirkular (*circular economy*) melalui dua inisiatif utama, yaitu *waste to energy* dan *waste to product*, sebagai wujud tanggung jawab lingkungan dalam setiap tahapan pengelolaan uang. Pemanfaatan limbah uang Rupiah menjadi energi dilakukan dengan mengolah briket limbah hasil racikan uang kertas sebagai bahan *co-firing* di sejumlah pembangkit listrik. Inisiatif ini menghasilkan sekitar 1,15 juta kWh listrik per tahun, yang setara dengan kebutuhan listrik bagi sekitar 72,3 ribu rumah tangga, dengan pemanfaatan ± 5.517 ton limbah uang Rupiah per tahun. Selain itu, pemanfaatan limbah uang Rupiah juga dikembangkan melalui program *waste to product*, antara lain dengan mengolah limbah menjadi *soil*

composter dan produk kerajinan bernilai guna, sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan semangat transformasi dan digitalisasi, Bank Indonesia terus melangkah maju membangun pengelolaan uang Rupiah yang modern, kolaboratif dan berkelanjutan (*sustainable*).

3.5.

Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Bank Indonesia terus melanjutkan akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) yang modern dan maju serta terintegrasi dengan strategi Operasi Moneter (OM) *pro-market* untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan ekonomi nasional. Melanjutkan capaian dan momentum positif yang telah terbangun melalui implementasi *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, Bank Indonesia menetapkan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas 2030 (BPPU 2030) sebagai arah dan landasan strategis pengembangan PUVA di Indonesia. Penetapan BPPU 2030 sekaligus merupakan implementasi UU P2SK yang memberi mandat kepada Bank Indonesia untuk mengatur, mengembangkan, dan mengawasi PUVA. UU P2SK juga memperluas mandat tersebut dengan menempatkan Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan derivatif PUVA yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). BPPU 2030 dirancang dengan sasaran strategis yang fokus pada 4 (empat) area, yaitu produk (*product*), harga (*pricing*), pelaku pasar (*participants*), dan infrastruktur (*infrastructure*) pasar keuangan atau 3P+I. Transformasi BPPU 2030 merupakan penguatan BPPU 2025 khususnya terkait integrasinya dengan strategi Operasi Moneter (OM) *pro-market*, besaran strategis pada aspek 3P+I, pengembangan infrastruktur PUVA dengan prinsip 3i dan digitalisasi data, serta penguatan pengaturan dan pengawasan PUVA. Pencapaian sasaran strategis pada BPPU 2030 akan ditempuh melalui 3 (tiga) strategi utama,

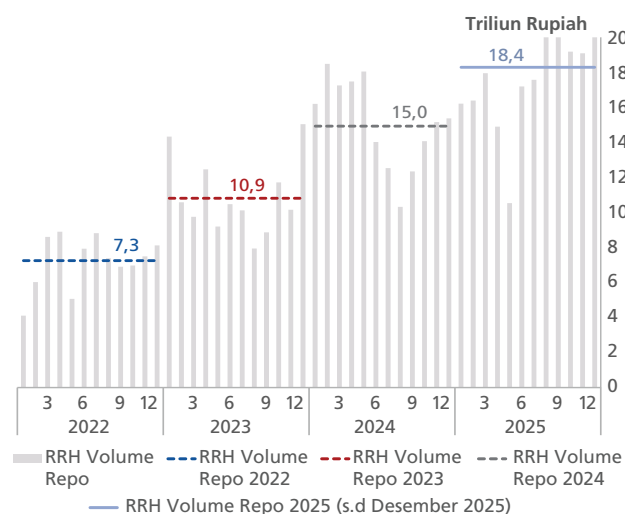


mencakup (1) pengembangan produk yang variatif dan likuid serta harga yang kredibel dan transparan, (2) pengembangan pelaku yang aktif dan kompeten serta Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang memenuhi prinsip 3i yaitu interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi, dan (3) sinergi dan koordinasi untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter. Bank Indonesia meyakini PUVA yang modern dan maju merupakan fondasi penting dalam memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan fiskal Pemerintah, serta memperluas akses pembiayaan bagi dunia usaha dan perekonomian.

Sejak implementasi BPPU 2030, transaksi PUVA Indonesia terus melanjutkan perkembangan positif.

Dari sisi pengembangan produk di pasar uang, data tahun 2025 menunjukkan rerata harian nilai transaksi repo pada tahun 2025 telah mencapai Rp18,4 triliun, meningkat 22,5% dari Rp15 triliun tahun 2024 dan meningkat 69,2% dari Rp10,9 triliun pada tahun 2023 (Grafik 3.21.). Sementara itu, transaksi OIS juga mengalami peningkatan rerata harian nilai transaksi OIS pada 2025 tercatat sebesar Rp52,8 miliar, meningkat 7,76% dari Rp49 miliar pada tahun 2024. Perkembangan positif tersebut didorong oleh berbagai inisiatif di tahun 2025 antara lain (1) penerapan kewajiban Dealer Utama (DU) PUVA dalam meningkatkan *counterparty* transaksi repo dan perluasan penandatanganan *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA), (2) perluasan *underlying* repo dalam operasi moneter yang menginisiasi perluasan *underlying* repo antarpelaku, dan (3) penerbitan BI-FRN (*Floating Rate Note*) sebagai instrumen surat berharga dengan kupon mengambang. Secara lebih rinci pada inisiatif *pertama*, penetapan kewajiban Dealer Utama PUVA untuk meningkatkan *counterparty* transaksi repo dan perluasan penandatanganan GMRA berkontribusi terhadap peningkatan interkoneksi pelaku transaksi repo. Inisiatif ini pada gilirannya juga dapat mendorong peningkatan volume dan efisiensi transaksi repo, memperluas basis pelaku pasar, serta meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun internasional. Inisiatif *kedua*, perluasan *underlying* repo dalam operasi moneter dengan mengikutsertakan surat berharga berkualitas

Grafik 3.21. Rerata Harian Transaksi Repo



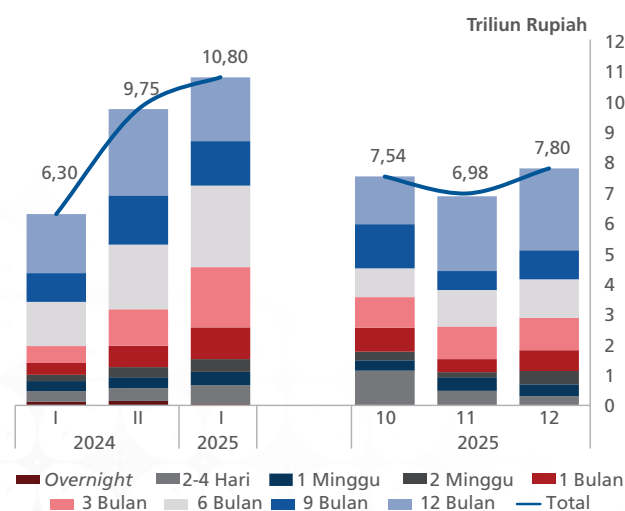
Sumber: Bank Indonesia

tinggi lainnya berupa obligasi korporasi dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan berbentuk entitas publik yang dibentuk atau didirikan Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat (*special mission vehicle*), menginisiasi perluasan *underlying* repo antarpelaku. Inisiatif *ketiga*, penerbitan BI-FRN (*Floating Rate Note*) sebagai instrumen surat berharga dengan kupon mengambang akan meningkatkan eksposur pelaku terhadap risiko suku bunga sehingga ditargetkan akan mendorong peningkatan transaksi *Overnight Index Swap* (OIS) sebagai instrumen lindung nilai suku bunga. Peningkatan volume transaksi OIS akan mendorong pembentukan harga di pasar uang sekaligus melengkapi *term-structure* pasar uang. Sejalan dengan inisiatif tersebut, untuk meningkatkan likuiditas di pasar OIS juga dilakukan pengembangan peran perusahaan pialang untuk memfasilitasi *matchmaking* OIS pada November 2025. Secara khusus, perkembangan positif dari transaksi repo juga mencerminkan penguatan peran transaksi repo sebagai instrumen yang memudahkan pelaku pasar melakukan pengelolaan likuiditas perbankan dengan memanfaatkan surat-surat berharga (khususnya SBN dan SRBI). Perkembangan ini turut memberikan dampak positif bagi pasar SBN. Likuiditas SBN meningkat dan *yield* SBN ikut turun sehingga berkontribusi positif terhadap penurunan beban pembiayaan fiskal Pemerintah.



Pendalaman PUVA juga diperkuat dengan strategi operasi moneter *pro-market* yang diterapkan Bank Indonesia. Strategi operasi moneter *pro-market* di antaranya dilakukan melalui penyediaan instrumen pasar uang yaitu SRBI, SUKBI, SVBI, SUVBI, dan BI-FRN guna mendorong peningkatan transaksi instrumen pasar uang tersebut di pasar sekunder sehingga memperkuat fungsi pasar sebagai sumber pembentukan harga (*price discovery*). Perkembangan transaksi pasar sekunder instrumen pasar uang di tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, didorong tren peningkatan transaksi SRBI di pasar sekunder. Pada semester I-2024 rerata harian transaksi SRBI di pasar sekunder baru mencapai sekitar Rp6,3 triliun. Pasca-implementasi Dealer Utama PUVA pada Mei 2024, rerata harian transaksi SRBI di pasar sekunder terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp10,8 triliun di semester I-2025 (Grafik 3.22.). Sejalan dengan perkembangan tersebut, interkoneksi antarpelaku pasar juga menunjukkan peningkatan yang tecermin dari rerata harian transaksi SRBI antara Dealer Utama dan Dealer Utama yang mengalami peningkatan dari Rp3,83 triliun pada semester II 2024 menjadi Rp4,02 triliun pada semester I 2025 serta antara Dealer Utama dan Nondealer Utama yang mengalami peningkatan dari Rp7,08 triliun pada semester II 2024 menjadi Rp8,17

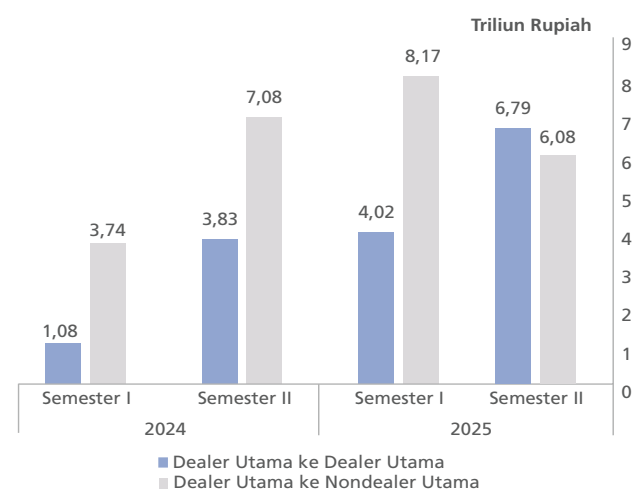
Grafik 3.22. Transaksi SRBI di Pasar Sekunder per Jangka Waktu



triliun pada semester I 2025 (Grafik 3.23.). Peningkatan tersebut berlanjut pada Semester II 2025 sebagaimana terlihat dari rerata transaksi harian SRBI antara Dealer Utama dan Dealer utama yang mencapai Rp6,79 triliun. Di sisi lain, rerata transaksi harian SRBI antara Dealer Utama dan Nondealer Utama tercatat sebesar Rp6,08 triliun, lebih rendah dari semester I 2025 seiring dengan kebijakan ekspansi likuiditas Rupiah. Perkembangan positif tersebut tidak terlepas dari kebijakan Bank Indonesia dalam menata struktur pelaku pasar melalui seleksi Dealer Utama untuk peningkatan transaksi dan interkoneksi antarpelaku di PUVA. Capaian ini sekaligus menunjukkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas perbankan serta pelaku pasar lainnya dalam mengelola likuiditas dan portfolio investasi, yang sebelumnya masih bergantung pada operasi moneter Bank Indonesia.

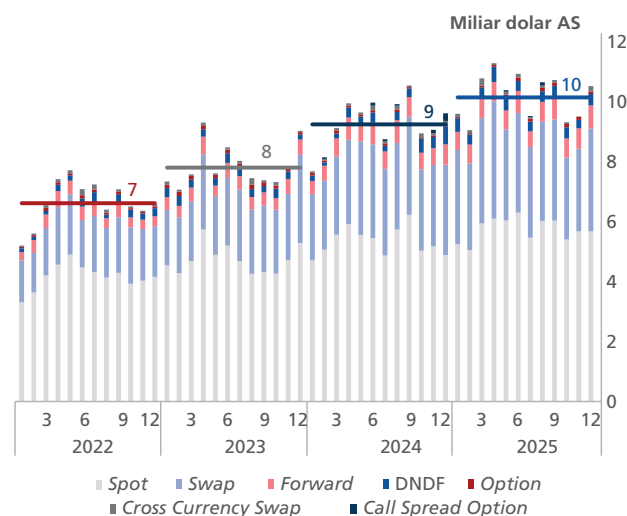
Sejalan dengan perkembangan tersebut, kinerja transaksi di pasar valuta asing (valas) juga menunjukkan perkembangan positif. Rerata harian transaksi valas pada 2025 tercatat sebesar 10,13 miliar dolar AS, meningkat 10% dari 9,23 miliar dolar AS pada tahun 2024 dan 30% dari 7,79 miliar dolar AS pada tahun 2023 (Grafik 3.24.). Meskipun masih didominasi transaksi *spot*, porsi transaksi derivatif valas terus meningkat menjadi 43% dari 42% pada tahun 2024 dan 40%

Grafik 3.23. Transaksi SRBI Dealer Utama dengan Dealer Utama dan Dealer Utama dengan Nondealer Utama





Grafik 3.24. Rerata Harian Transaksi Valas



Sumber: Bank Indonesia

di tahun 2023. Sejalan dengan pengembangan transaksi derivatif valas, peningkatan rerata harian transaksi DNDF terus berlanjut hingga mencapai 364 juta dolar AS per hari di tahun 2025 dari 298 juta dolar AS per hari di tahun 2024 dan 268 juta dolar AS di tahun 2023. Peningkatan volume DNDF turut meningkatkan *competitiveness* harga DNDF dibandingkan dengan NDF *offshore* sehingga transaksi DNDF semakin efisien. Perkembangan positif tersebut didorong oleh berbagai langkah strategis di tahun 2025 antara lain: (1) implementasi fasilitas DNDF untuk Dealer Utama PUVA yang menandakan perluasan cakupan Dealer Utama PUVA di pasar valuta asing, (2) pelaksanaan forum koordinasi dan sinergi dengan asosiasi pelaku pasar untuk pengembangan pasar valas, dan (3) upaya perluasan kontrak standar penerapan margin.

Inisiatif pengembangan produk pasar valas utamanya diarahkan untuk meningkatkan likuiditas di pasar valas. *Pertama*, implementasi Dealer Utama pasar valas pada awal semester II 2025 telah berkontribusi terhadap perkembangan transaksi DNDF baik dari sisi volume maupun interkoneksi antarpelaku. *Kedua*, koordinasi dengan asosiasi pelaku pasar yaitu APUVINDO, mencakup evaluasi pengembangan DNDF dan sosialisasi implementasi lindung nilai, mendukung perluasan pelaku transaksi valas. Bank Indonesia telah memenuhi komitmen G20 *Over the Counter (OTC) Derivatives Market Reform* melalui

implementasi transaksi DNDF yang terstandarisasi dan dikliringkan melalui *Central Counterparty (CCP)*. *Ketiga*, pemberlakuan ketentuan mengenai kebijakan *Non Centrally Cleared Derivatives (NCCD)* atau Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP pada 1 September 2025, juga mendukung Bank Indonesia untuk terus mengembangkan DNDF yang dikliringkan melalui CCP. Untuk itu, pada 2025 Bank Indonesia telah menerapkan perluasan kontrak standar margin diawali dengan penandatanganan komitmen oleh pelaku pasar. Berbagai langkah strategis tersebut diharapkan dapat memperkuat DNDF sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*), baik bagi perbankan dan pelaku pasar maupun bagi dunia usaha.

Perkembangan positif di pasar uang dan pasar valas juga didukung dengan perolehan *netting opinion* dari *International Swaps and Derivatives Association (ISDA)* sejak April 2025 dan *collateral opinion* pada Agustus 2025 sehingga mendukung implementasi *close out netting*. Sebagai kelanjutan dari perolehan status *netting opinion* tersebut, Bank Indonesia akan berfokus pada perluasan adopsi kontrak standar PUVA antara lain GMRA, ISDA, PIDI, dan Kontrak Penerapan Margin. Upaya tersebut sejalan dengan rencana strategis Bank Indonesia untuk terus mengembangkan produk PUVA dengan memperdalam repo dan DNDF, serta memperluasnya dengan produk-produk lain seperti *swap* suku bunga (*Interest Rate Swap, IRS*) dan *swap* antar nilai tukar. *Regulatory reform* di pasar uang dan pasar valas terus diperkuat melalui penerbitan ketentuan pelaksanaan yang mengatur transaksi pasar uang dan penyelenggaraan sarana transaksi. Kelanjutan *regulatory reform* tersebut senantiasa diarahkan kepada tujuan pendalaman pasar uang dan pasar valas sehingga efektivitas transmisi kebijakan moneter dapat meningkat, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan pembiayaan ekonomi nasional dapat tumbuh berkelanjutan.

Dari sisi mekanisme pembentukan harga (*pricing*), inisiatif diarahkan untuk pembentukan *term structure* pasar uang yang efisien dari tenor 2 minggu hingga 12 Bulan. Di Pasar Uang, Bank Indonesia telah menetapkan suku bunga acuan INDONIA untuk tenor *overnight* dan *Compounded*

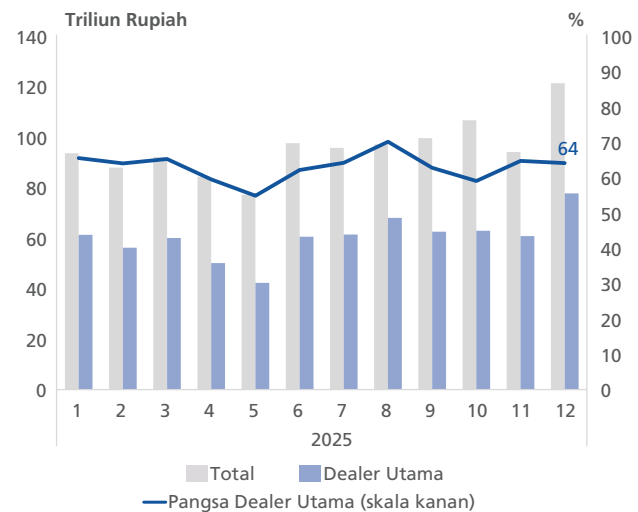


INDONESIA untuk tenor 30 hari, 90 hari, 180 hari dan 360 hari yang bersifat *backward looking*. Selanjutnya, sebagai bagian dari *benchmark reform*, Bank Indonesia menerbitkan BI-FRN (*Floating Rate Note*) untuk mendorong perkembangan transaksi *Overnight Index Swap* (OIS). Harga yang terbentuk dari transaksi OIS akan mendukung pembentukan struktur suku bunga di pasar uang yang bersifat *forward looking* berdasarkan transaksi khususnya untuk tenor 2 minggu hingga 12 bulan. Perkembangan tersebut selanjutnya diharapkan dapat mendukung pembentukan *money market curve* yang kredibel, sehingga semakin memperkuat fungsi *price discovery* di pasar uang.

Di sisi pasar valas, JISDOR dan Kurs acuan Non-USD/IDR telah dikembangkan sebagai referensi nilai tukar harian di pasar valas dengan mengacu pada praktik terbaik yang berlaku secara internasional. Kurs acuan Non-USD/IDR diperluas menjadi 17 *currency pair* pada tahun 2025, dari sebelumnya 14 *currency pair* pada tahun 2024, dengan penambahan kurs baru meliputi AED/IDR, PHP/IDR dan INR/IDR. Sejalan dengan inisiatif di pasar uang, pengembangan transaksi FX Swap dan FX Forward untuk tenor panjang akan diarahkan kepada upaya pembentukan FX Forward Curve sebagai kurs acuan dalam transaksi derivatif di pasar valas. Terbentuknya *money market curve* dan FX forward curve yang kredibel dan mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya mengindikasikan pasar uang dan pasar valas yang dalam dan efisien sehingga mampu memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter secara menyeluruh.

Bank Indonesia senantiasa melakukan pengembangan pelaku PUVA agar semakin aktif, kompeten, berintegritas, dan profesional sekaligus memperkuat peran asosiasi dalam mempercepat pendalaman PUVA. Sebagai bentuk penataan struktur pelaku PUVA untuk menciptakan pelaku pasar yang aktif, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Dealer Utama PUVA pada tahun 2024. Hingga Desember 2025, Bank Indonesia telah menetapkan 20 bank sebagai Dealer Utama PUVA yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam

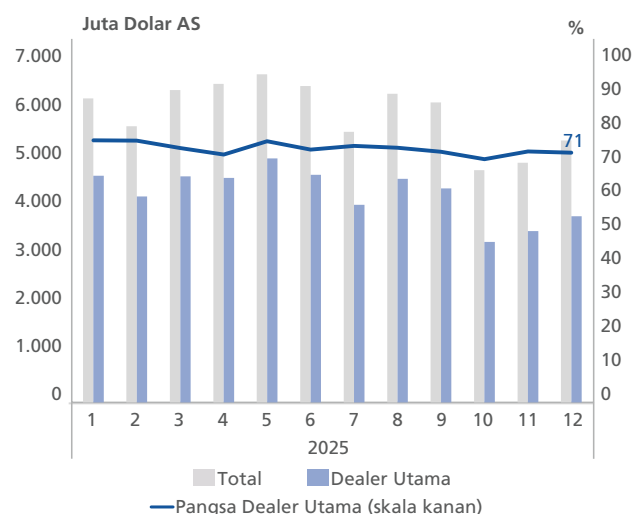
Grafik 3.25. Transaksi Dealer Utama di Pasar Uang



Sumber: Bank Indonesia

akselerasi pengembangan PUVA.¹¹ Hal ini tecermin dari *share* rerata harian transaksi Dealer Utama PUVA yang telah mencapai 64% di pasar uang (Grafik 3.25.) dan 71% di pasar valas (Grafik 3.26.). Pencapaian tersebut dikontribusikan melalui implementasi kebijakan Dealer Utama PUVA antara lain: (1) penguatan kewajiban Dealer Utama PUVA meliputi peningkatan peran Dealer Utama PUVA sebagai *market maker*, keaktifan dalam transaksi operasi moneter, serta partisipasi aktif dalam transaksi di PUVA,

Grafik 3.26. Transaksi Dealer Utama di Pasar Valas



Sumber: Bank Indonesia

¹¹ Hingga Januari 2026, sebanyak 21 bank ditetapkan sebagai Dealer Utama PUVA.



(2) penguatan kapasitas Dealer Utama PUVA melalui peningkatan *counterparty line* repo dan penyediaan fasilitas DNDF khusus Dealer Utama PUVA, dan (3) evaluasi kinerja berkala atas pemenuhan kriteria Dealer Utama PUVA. Secara lebih rinci untuk implementasi pertama, dalam menjalankan kewajibannya, Dealer Utama PUVA memainkan peran penting dalam mendukung inisiatif strategis pendalaman PUVA sejalan dengan implementasi BPPU 2030 antara lain pelaksanaan transaksi repo seiring perluasan *underlying* repo dengan surat berharga berkualitas tinggi serta pembentukan harga OIS melalui penyediaan kuota. Pada implementasi kedua, penguatan kapasitas Dealer Utama PUVA juga diakselerasi melalui penerapan kewajiban *counterparty line* repo pada April 2025 dan penyediaan fasilitas DNDF khusus Dealer Utama PUVA sejak awal semester II 2025 untuk mendorong peningkatan likuiditas dan efisiensi pasar repo dan pasar derivatif valas domestik. Selanjutnya, Bank Indonesia secara berkala juga melakukan evaluasi atas kinerja Dealer Utama PUVA berdasarkan pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan efektivitas dari tercapainya tujuan dari implementasi Dealer Utama PUVA.

Dari sisi kualitas, pelaku pasar PUVA khususnya aspek kompetensi, tingkat kepemilikan sertifikat tresuri pada tahun 2025 telah mencapai 95% dari total tresuri dealer, yang mencerminkan peningkatan profesionalisme dan kapasitas pelaku PUVA. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia bersama pemangku kepentingan yang terus menyempurnakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Tresuri agar tetap relevan dengan dinamika pasar dan kebutuhan industri keuangan terkini. Penyempurnaan ini bertujuan memperkuat kredibilitas sertifikasi profesi tresuri sebagai acuan kompetensi nasional sekaligus memastikan pelaku pasar memiliki kemampuan teknis, integritas, dan profesionalisme yang sesuai dengan standar global. Dalam proses penguatan kualitas pelaku PUVA, Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valas Indonesia (APUVINDO) senantiasa berperan aktif sebagai mitra strategis Bank Indonesia

antara lain dalam penyelenggaraan sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar (*Market Code of Conduct*).

Akselerasi pengembangan PUVA dilakukan dengan melibatkan APUVINDO sebagai mitra strategis Bank Indonesia diseluruh aspek 3P+ untuk pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas. Beberapa langkah konkret kolaborasi APUVINDO dalam pengembangan pasar antara lain (1) penyusunan pedoman akuntansi transaksi PUVA melalui CCP yang disusun oleh APUVINDO dengan melibatkan KPEI, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan anggota CCP, (2) kegiatan *sharing session* dari APUVINDO kepada seluruh perbankan mengenai implementasi dan keuntungan dari berbagai inisiatif pengembangan PUVA seperti produk PUVA dan CCP, serta (3) evaluasi inisiatif pengembangan PUVA. Melalui koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia, seluruh program kerja APUVINDO senantiasa diarahkan agar selaras dengan arah kebijakan BPPU 2030 dan mandat PBI No.6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valas, guna memperkuat tata kelola, efisiensi, dan daya saing pasar keuangan nasional.

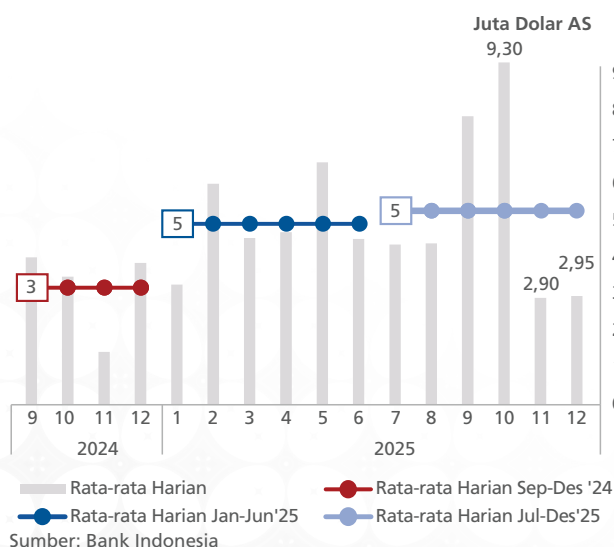
Dari sisi infrastruktur PUVA, penguatan dan pengembangan dilakukan menyeluruh mencakup 3 (tiga) sisi yaitu *front-end*, *middle-end*, dan *back-end*. Penguatan infrastruktur *pertama* yakni *front end* ditujukan untuk mendukung strategi integrasi PUVA dengan operasi moneter *pro-market* guna mengakselerasi peningkatan likuiditas transaksi di PUVA, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong pembentukan harga yang efisien. Penguatan infrastruktur *front-end* di sisi Bank Indonesia – *Electronic Trading Platform* (BI – ETP) dilakukan melalui peningkatan fitur untuk mengakomodasi: (1) penerbitan BI-FRN, (2) perluasan *underlying* repo Bank Indonesia berupa surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh korporasi berupa lembaga jasa keuangan berbentuk entitas publik dengan penugasan khusus, dan (3) penyesuaian platform peserta BI-ETP berupa *enhancement* fitur *collateral search*. Guna mendukung penerapan strategi operasi moneter *pro-market* yang bertujuan untuk mendorong pelaku pasar lebih banyak



melakukan transaksi dalam pengelolaan likuiditas melalui transaksi antarpelaku dibanding transaksi dengan Bank Indonesia, kapabilitas infrastruktur sarana transaksi terus diperkuat. Penguatan infrastruktur *front-end* di sisi sarana transaksi antarpeserta dilakukan melalui: (1) penerbitan ketentuan penyelenggaraan sarana transaksi, (2) pengembangan interkoneksi dari sistem transaksi antar pelaku pasar ke *Central Counterparty*, dan (3) penguatan peran perusahaan pialang sebagai operator *matchmaking* OIS antarbank.

Kedua, penguatan infrastruktur di sisi *middle-end*, difokuskan pada penguatan *Central Counterparty* Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP PUVA). Sejak peluncuran pada 30 September 2024, volume transaksi DNDF yang dikliringkan di CCP PUVA terus meningkat hingga mencapai 1,3 miliar dolar AS dengan rata-rata harian (RRH) terus meningkat mencapai 9,3 juta dolar AS pada Oktober 2025 dibandingkan dengan kondisi bulan awal implementasi (September 2024) sebesar 4 juta dolar AS, meskipun pada November dan Desember 2025 mengalami penurunan menjadi masing-masing sebesar 2,9 juta dolar AS dan 2,95 juta dolar AS sejalan dengan faktor siklikal akhir tahun (Grafik 3.27.). Pemanfaatan CCP PUVA oleh pelaku pasar dapat semakin meningkatkan efisiensi transaksi PUVA melalui fitur novasi, *multilateral netting*, dan penguatan manajemen risiko khususnya *counterparty risk*. Penguatan CCP PUVA terus dilakukan sepanjang tahun 2025

Grafik 3.27. Rata-rata Harian Transaksi DNDF melalui *Central Counterparty*

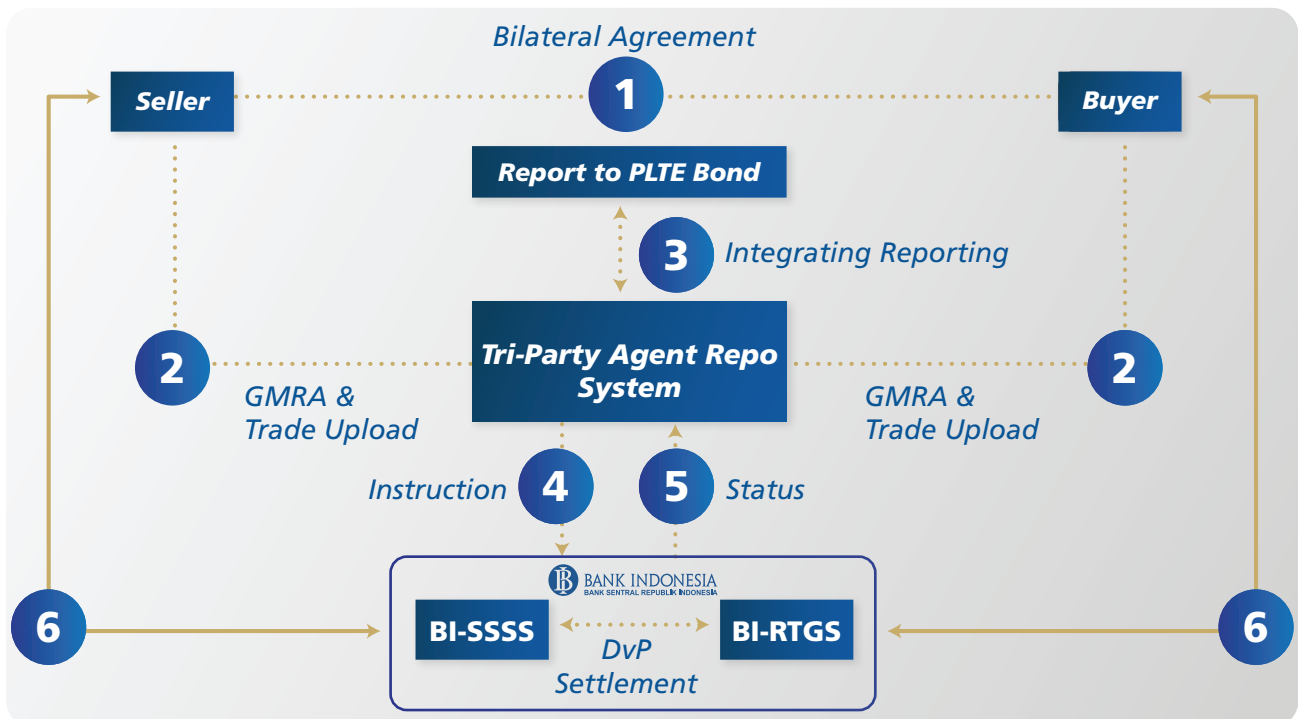


melalui (1) peningkatan fitur CCP PUVA agar dapat mengkliringkan berbagai variasi tenor, (2) penguatan *rule book* CCP PUVA agar dapat mengakomodasi peningkatan fitur dan kapabilitas CCP PUVA, (3) penerbitan pedoman akuntansi bagi transaksi PUVA yang dikliringkan di CCP oleh APUVINDO. Penguatan CCP juga dilakukan melalui (1) penyelenggaraan *workshop* CCP dan seminar nasional mengenai CCP, serta penyelenggaraan sosialisasi mengenai CCP berkolaborasi dengan APUVINDO, (2) perluasan peserta CCP PUVA, dan (3) inisiasi perolehan status *recognized* CCP dari regulator di Uni Eropa (European Commission dan European Securities and Market Authority) dan Inggris (His Majesty Treasury and Bank of England).

Peningkatan kapabilitas CCP PUVA juga dilakukan melalui penambahan layanan *Tri-Party Agent Repo* (TPA Repo) yang mulai beroperasi pada tanggal 29 September 2025. Perluasan peran CCP sebagai penyelenggara TPA Repo memungkinkan Bank untuk mengalihkan fungsi *collateral management*, administrasi dan penyelesaian transaksi, serta pelaporan transaksi repo dari *back office* ke TPA Repo. Melalui TPA Repo, pelaku pasar dapat mengurangi risiko operasional sekaligus mendorong transaksi repo yang lebih efisien, transparan, dan terstandarisasi sehingga mendukung akselerasi pengembangan pasar repo. Lebih lanjut, perluasan layanan CCP sebagai *Tri-Party Repo Agent* mencerminkan implementasi IPK yang selaras dengan prinsip 3i, dengan dukungan operasional yang terintegrasi secara *end-to-end* dengan sistem penyelesaian baik sisi surat berharga maupun dana yaitu BI-SSSS dan BI-RTGS (Gambar 3.2.). Pada tahap awal, terdapat 8 bank yang menjadi *piloting member* dari TPA Repo, meliputi Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Permata, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, Maybank, dan BPD Jawa Timur. Sejak implementasi TPA Repo pada 29 September 2025 s.d 31 Desember 2025, volume transaksi repo intrabank via TPA Repo telah mencapai Rp339 miliar, dengan sebaran tenor *overnight* (O/N), 1 minggu, dan 2 minggu.

Ketiga, penguatan infrastruktur di sisi *back end* difokuskan pada penguatan di sisi Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Kapabilitas infrastruktur

Gambar 3.2. Proses Bisnis *Tri-Party Agent (TPA) Repo*



Sumber: Bank Indonesia

sisi *back end* dalam menyelesaikan berbagai ragam dan variasi transaksi PUVA berperan krusial dalam mendukung kesuksesan inisiatif pengembangan produk yang diarahkan untuk meningkatkan variasi dan likuiditas PUVA. Penguatan infrastruktur di sisi BI-SSSS dilakukan melalui pengembangan sistem untuk mendukung: (1) penerbitan BI-FRN termasuk setelmen lelang repo Bank Indonesia dengan *underlying* BI-FRN, setelmen transaksi BI-FRN di pasar sekunder antar pelaku pasar, dan pembayaran imbalan BI-FRN, (2) perluasan investor Sukuk Bank Indonesia dari semula hanya bank menjadi termasuk investor nonbank, dan (3) perluasan *underlying* repo Bank Indonesia berupa surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh korporasi yang merupakan lembaga jasa keuangan berbentuk entitas publik dengan penugasan khusus. Selain pengembangan pada sistem saat ini, Bank Indonesia menginisiasi pengembangan BI-SSSS Generasi III melalui penyusunan kebutuhan bisnis dengan melibatkan peran serta dan masukan dari pelaku pasar yang diwakili oleh asosiasi pelaku pasar.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan otoritas sektor keuangan lainnya (Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan) baik untuk pengembangan pasar keuangan dalam edukasi dan literasi keuangan maupun untuk sumber pembiayaan ekonomi.

Sinergi diperkuat melalui Forum Koordinasi Pengembangan Sektor Keuangan (FK-PSK) yang terdiri dari 4 (empat) otoritas di sektor keuangan yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara berkesinambungan sebagaimana amanat UU P2SK. Sinergi FK-PSK juga diarahkan untuk mendorong peningkatan basis investor ritel melalui kampanye kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT). Sepanjang tahun 2025, telah dilaksanakan 7 (tujuh) kali LIKE IT di berbagai kota di Indonesia yang diarahkan pada generasi muda. Dengan adanya LIKE IT, generasi muda diarahkan untuk meningkatkan peran sertanya dalam investasi di pasar keuangan sebagai bagian dari pendidikan



perencanaan keuangan mereka, dan sekaligus investasi yang selanjutnya akan berperan penting untuk peningkatan tabungan dan pembiayaan perekonomian nasional. Kemudahan investasi di pasar keuangan semakin didukung pula dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan juga inovasi investasi ritel yang terus dikembangkan dan ditawarkan oleh perbankan dan perusahaan sekuritas. Di samping itu, sinergi dan penguatan juga ditempuh dalam rangka harmonisasi pengaturan perpajakan pasar uang dan pengaturan perbankan guna mendukung pengembangan instrumen keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional, serta pengembangan infrastruktur antarpasar untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan infrastruktur pasar keuangan. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga turut aktif dalam pengembangan sektor keuangan yang berkelanjutan (*environmental, social, and governance*, atau ESG). Di samping itu, sinergi dan penguatan juga ditempuh dalam rangka harmonisasi pengaturan untuk mendukung pengembangan PUVA dalam rangka penyediaan sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.

3.6.

Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan serta Ekonomi Keuangan Syariah

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendorong akselerasi Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan (IEKB) guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Pelaksanaan IEKB ditempuh melalui (i) pengembangan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang terintegrasi dan berdaya saing, (ii) pembiayaan inklusif dan berkelanjutan yang optimal, dan (iii) literasi dan sinergi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan yang meluas. Secara lebih detil, pengembangan ekosistem berfokus pada pemberdayaan usaha inklusif guna meningkatkan daya saing UMKM dan kelompok subsisten secara *end to end* dari hulu ke hilir melalui berbagai inisiatif strategis seperti ECO-RISE (*Empowering Community & MSMEs toward Resilient, Inclusive, and Sustainable Economy*) dan penguatan kapasitas dan pendampingan secara *end to end*. Inisiatif ini diperkuat dengan perluasan akses pasar melalui penyelenggaraan



Gubernur Bank Indonesia memberikan Sambutan pada Opening Ceremony Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 pada 7 Agustus 2025.



Karya Kreatif Indonesia (KKI) sebagai *flagship program* perluasan akses pasar UMKM dalam negeri, program DIGDAYA UMKM (Digitalisasi untuk Peningkatan Daya Saing UMKM) untuk perluasan akses pasar secara digital, serta kurasi dan promosi perdagangan baik domestik dan internasional. Di sisi lain, pengembangan infrastruktur dan digitalisasi diarahkan untuk membentuk ekosistem usaha yang efisien dan adaptif melalui penyusunan model bisnis replikasi, *enhancement* Indonesia SME *Export Hub*, serta penguatan sistem data, pemantauan, dan evaluasi program. Dalam aspek pembiayaan, Bank Indonesia mendorong pembiayaan inklusif dan berkelanjutan salah satunya melalui pengembangan infrastruktur pembiayaan inklusif dan berkelanjutan, antara lain melalui pemanfaatan SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan), BI-SAID (*Database Profil UMKM Potensial Dibiayai*), dan kalkulator hijau untuk mendorong transisi pelaku usaha menuju ekonomi hijau. Fasilitas pembiayaan juga terus diperluas melalui inovasi program yang mendukung akses keuangan, pembangunan berkeadilan, dan pertumbuhan berorientasi jangka panjang. Sementara itu, pada aspek literasi dan sinergi ekonomi-keuangan, Bank Indonesia memperkuat pemahaman masyarakat terhadap potensi dan risiko keuangan inklusif dan berkelanjutan melalui penerapan KLIK (Kompetensi Inti Literasi dan Inklusi Keuangan), modul edukasi terstandarisasi, serta kegiatan edukasi dan pendampingan yang berkesinambungan di seluruh daerah. Penguatan sinergi juga dilakukan melalui inisiatif BERSATU UMKM (Bersinergi, Satukan dan Majukan UMKM) yang bertujuan untuk tingkat keuangan inklusif melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait.

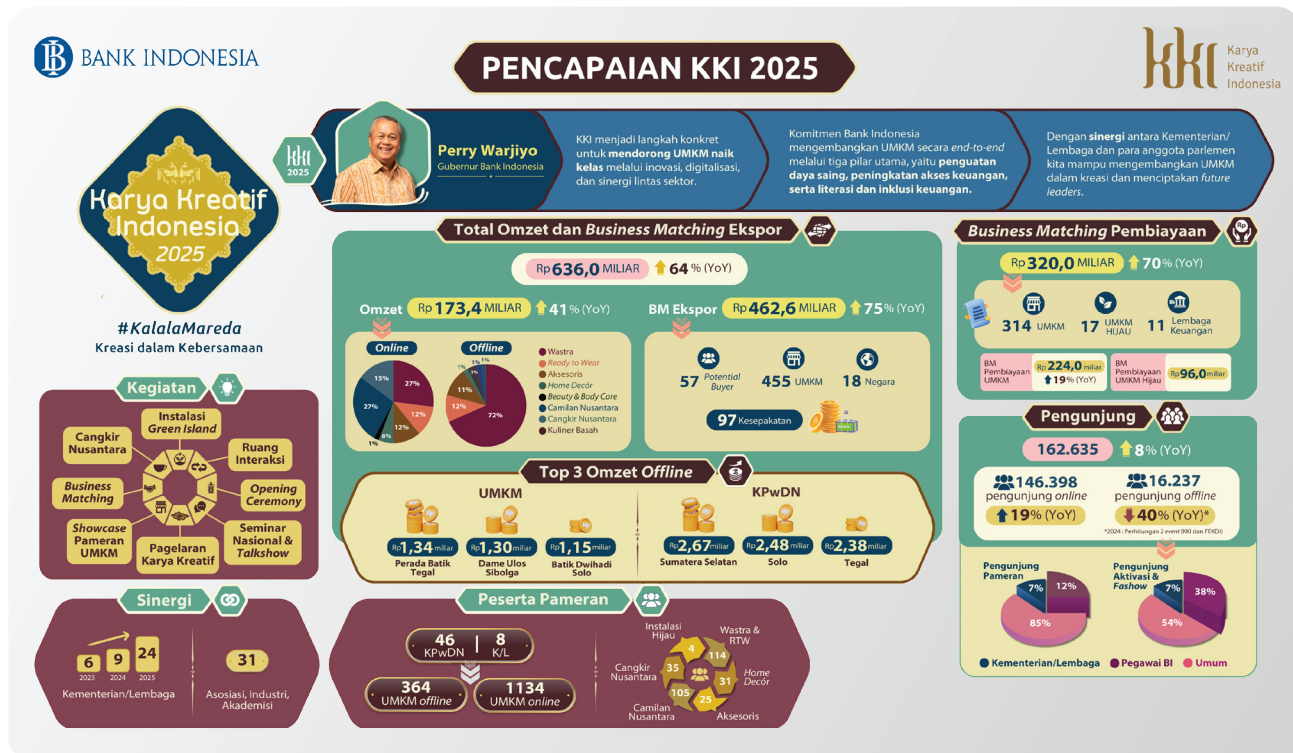
Dalam rangka akselerasi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan, Bank Indonesia terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan mitra strategis di tingkat nasional. Melalui peran aktif seluruh Kantor Perwakilan di daerah dan luar negeri, Bank Indonesia secara berkelanjutan melaksanakan berbagai inisiatif, seperti kegiatan

business matching pembiayaan dan ekspor, *on boarding* UMKM, serta peningkatan kapasitas untuk memperkuat daya saing pelaku UMKM. Salah satu bentuk konkret kerja sama tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 yang mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi: Kunci Penguatan Peran UMKM sebagai Motor Penggerak Ekonomi Berkelanjutan”, tema wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), dan tagar #KalalaMareda, bermakna “kreasi dalam kebersamaan” yang berasal dari Bahasa Sumba. Bersinergi dengan lebih dari 24 kementerian/lembaga dan 31 asosiasi, industri serta akademisi, Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 berhasil mencatat capaian yang menggembirakan. Kegiatan ini diikuti lebih dari 1.400 UMKM dan menarik lebih dari 150 ribu pengunjung baik daring maupun luring, dengan peningkatan omzet UMKM serta hasil *Business Matching* ekspor sebesar 64% hingga mencapai Rp636 miliar, serta *Business Matching* pembiayaan UMKM dan UMKM hijau meningkat 70% (yoy) mencapai Rp320 miliar (Gambar 3.3.). Lebih dari itu, KKI 2025 juga menjadi bukti nyata komitmen Bank Indonesia terhadap penerapan ekonomi dan keuangan berkelanjutan. Melalui inisiatif KKI BIJAK (KKI wujud Bank Indonesia untuk Jejak Alam Keberlanjutan), seluruh emisi karbon yang dihasilkan selama kegiatan diimbangi (*offset*) melalui pembelian *carbon credit* sebesar 150 ton CO₂ dan penanaman lebih dari 20 ribu pohon, sebagai langkah konkret menuju kegiatan yang ramah lingkungan. Capaian ini menunjukkan efektivitas sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh, berdaya saing, dan berwawasan hijau, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi, mengembangkan kapasitas digital, serta menembus pasar global guna memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Bank Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang mandiri dan inklusif. Pengembangan tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) pilar strategi, yaitu: (i) pengembangan ekosistem Rantai Nilai Halal yang terintegrasi dan berdaya saing; (ii) optimalisasi



Gambar 3.3. Capaian Penyelenggaraan KKI 2025



Sumber: Bank Indonesia

pembiayaan syariah; dan (iii) penguatan Literasi Eksyar dan Inklusi Eksyar. Tiga strategi utama tersebut kemudian diturunkan menjadi 6 inisiatif strategis (6 rukun) akselerasi eksyar nasional yaitu (i) GERBANG SANTRI (Gerakan Pengembangan Pesantren dan Rantai Nilai Halal); (ii) JAWARA Ekspor (Jaringan Wirausaha Syariah Mendorong Ekspor); (iii) GEMA HALAL (Gerakan Berjamaah Akselerasi Halal); (iv) SAPA SYARIAH (Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah); (v) KANAL ZISWAF (Kolaborasi Nasional Pengembangan ZISWAF) dan (vi) LENTERA EMAS (Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah menuju Indonesia Emas). Selanjutnya keenam inisiatif tersebut, difokuskan untuk mendukung ketiga strategi utama di atas. *Pertama*, penguatan ekosistem Rantai Nilai Halal, dengan inisiatif strategis GERBANG SANTRI, JAWARA Ekspor dan GEMA HALAL. *Kedua*, penguatan pembiayaan syariah, dengan inisiatif strategis SAPA SYARIAH dan KANAL ZISWAF. *Ketiga*, penguatan Literasi dan Inklusi Eksyar, melalui inisiatif strategis LENTERA EMAS.

Seluruh inisiatif di atas diarahkan untuk dapat berkontribusi pada target Program Prioritas

(PP) Ekonomi Syariah dalam RPJMN 2025-2029, RPJPN 2025-2045, Asta Cita menuju Indonesia Emas, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi pada program-program seluruh pemangku kepentingan. Sepanjang 2025, penguatan ekosistem rantai nilai halal dilakukan melalui program pemberdayaan usaha pesantren yang telah diimplementasikan pada lebih dari 1000 unit usaha pesantren di 34 provinsi dengan sektor usaha yang beragam; program yang mendorong pertumbuhan ekspor produk halal Indonesia melalui seleksi dan kurasi pelaku dan produk potensial ekspor, pendampingan, serta promosi; dan program peningkatan produksi bahan baku halal dalam negeri, akselerasi sertifikasi halal pada sisi hulu, penguatan *halal center* dan sistem informasi halal untuk perlindungan konsumen serta *traceability*. Adapun penguatan keuangan syariah dilakukan melalui penguatan kebijakan, regulasi dan inovasi antara lain KLM dan *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA), pengembangan PUVA Syariah yang mencakup aspek produk, *pricing*, pelaku dan infrastruktur (3P+1I), program fasilitasi akses pembiayaan dan perdagangan antara lain Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) dan

pengembangan model bisnis *Sharia Economic Development Fund* (SEDF) serta pengembangan pusat terintegrasi (PINTER) data ZISWAF yang merupakan sistem terpadu untuk mengelola data ZISWAF di Indonesia. Untuk penguatan literasi dan inklusi eksyar Bank Indonesia melakukan survei literasi dan inklusi eksyar, standarisasi konten literasi eksyar dan peningkatan kualitas SDM eksyar, serta penguatan kolaborasi dan penguatan digitalisasi termasuk dalam rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) di tiga wilayah, Sarasehan Nasional Eksyar, dan ISEF ke 12 Tahun 2025 di Jakarta.

Sinergi erat seluruh pemangku kepentingan pengembangan ekonomi syariah mampu menyukseskan program unggulan FESyar dan ISEF 2025. Sinergi Bank Indonesia yang semakin solid dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), kementerian/ lembaga terkait, dan mitra strategis lainnya, termasuk dengan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IsDB), International Islamic Financial Market (IIFM), International Islamic Liquidity Management (IILM), dan Islamic Financial Services Board (IFSB), kembali mampu mewujudkan kesuksesan penyelenggaraan rangkaian kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.

Pada tahun 2025, telah diselenggarakan kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Keuangan Syariah berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak untuk mencapai target RPJMN 2025-2029, yang mencakup peningkatan kontribusi PDB Syariah dan posisi Indonesia di laporan State of Global Islamic Economy (SGIE). Kemudian, dalam ISEF 2025 telah terselenggara 100 rangkaian kegiatan bekerja sama dengan 34 K/L, 30 mitra internasional dan lebih dari 700 pelaku UMKM dan industri. Nilai *business matching* pembiayaan dan perdagangan selama 5 hari ISEF mencapai Rp2,7 triliun dengan rincian Rp2,5 triliun untuk komitmen dan realisasi pembiayaan, Rp231 miliar untuk komitmen dan realisasi perdagangan. Jika digabungkan dengan capaian selama FESyar sebagai *road to ISEF* jumlahnya mencapai Rp3,1 triliun. Jumlah ini meningkat lebih dari 50% dari nilai tahun lalu sebesar Rp2 triliun (Gambar 3.4.). Penyelenggaraan ISEF menjadi salah satu kegiatan yang menunjukkan *leadership* Indonesia di sektor ekonomi dan keuangan syariah yang ditunjukkan antara lain dengan dipertahankannya peringkat Indonesia

Gambar 3.4. Capaian Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan ISEF ke-12 Tahun 2025



Sumber: Bank Indonesia



sebagai top 3 *global* dalam State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025.

3.7. Kebijakan Internasional

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional untuk mendukung ketahanan dan stabilitas makroekonomi. Kerja sama Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) dengan mitra internasional terus diperkuat sebagai langkah preventif dari dampak rambatan ketidakpastian global. Pada 2025, Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBoC) sepakat memperbarui perjanjian *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) untuk jangka waktu lima tahun. Kerja sama ini memungkinkan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga 400 miliar yuan Tiongkok (ekuivalen 55 miliar dolar AS) dengan nilai Rupiah yang setara. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat kerja sama BCSA dengan Reserve Bank of Australia senilai 10 miliar dolar Australia (ekuivalen 6,2 miliar dolar AS) untuk jangka waktu lima tahun. Perjanjian kerja sama tersebut merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung Asta Cita, terutama dalam menjaga ketahanan sektor eksternal. Di tataran regional ASEAN+3, Bank Indonesia aktif memperkuat JPKI dan terlibat aktif dalam

pembahasan *New Financing Structure Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM). Berbagai kerja sama tersebut memperkuat bantalan ketahanan eksternal Indonesia yang telah dijalin sebelumnya antara lain dengan Federal Reserve dan Bank for International Settlement (BIS). Dalam menghadapi tantangan global, pada berbagai forum internasional Bank Indonesia menyampaikan 3 (tiga) penekanan utama, yakni (i) peran aktif organisasi internasional, terutama IMF, diperlukan untuk menyuarakan urgensi kebijakan perdagangan internasional yang terbuka guna mendorong pertumbuhan ekonomi, (ii) penerapan *integrated policy mix* dan inovasi kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, sekaligus mendorong pembiayaan hijau dan inklusif; serta (iii) komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan *rule-based*.

Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan transaksi dalam mata uang lokal melalui penguatan kerja sama dan mendorong implementasinya.¹² Sejak diinisiasi pada 2018, Bank Indonesia telah memiliki kerja sama LCT dengan delapan bank sentral/otoritas, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Bank of Thailand (BoT), Japan Ministry of Finance (JMOF), PBoC, Monetary

¹² Penjelasan lebih rinci mengenai upaya untuk meningkatkan transaksi dalam mata uang lokal dapat dilihat pada Boks 3.4. Sinergi Perluasan Penggunaan Mata Uang Lokal Mendukung Pendalaman Pasar Keuangan Domestik.



Bank Indonesia berupaya meningkatkan transaksi dalam mata uang lokal dan mewujudkan konektivitas pembayaran antarnegara

Authority of Singapore (MAS), Bank of Korea (BoK), Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE), dan Reserve Bank of India (RBI). Pada 2025, kerja sama *Local Currency Transaction* (LCT) dengan PBoC, BNM dan BoT diperbarui untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Pembaruan kerja sama tersebut memperluas kerangka kerja LCT yang semula terbatas pada perdagangan dan investasi langsung menjadi meliputi transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan. Kerja sama LCT dengan CBUAE telah dapat diimplementasikan sejak awal 2025. Dengan perkembangan tersebut, dunia usaha memiliki opsi dalam menyelesaikan transaksi pembayaran antarnegara dengan menggunakan kuotasi nilai tukar secara langsung yang disediakan oleh bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD). Penguatan kerja sama juga telah dilakukan dengan BNM dan BoT, yang disinergikan dengan inisiatif sistem pembayaran lintas negara. Inisiatif sinergi juga dilakukan dengan Jepang dan Tiongkok melalui kegiatan *High Level Campaign* LCT dan QR Antarnegara Indonesia-Jepang dan Indonesia-Tiongkok. Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan LCT di dalam negeri, telah dibentuk Satuan Tugas Nasional (Satgas) LCT lintas kementerian/lembaga sejak 2023.

Bank Indonesia aktif meningkatkan kerja sama bilateral kebanksentralan untuk memperkuat kapasitas dan mendorong kerja sama di bidang sistem pembayaran. Kerja sama bilateral dengan mitra (*Structured Bilateral Cooperation*, SBC) terus dilakukan di berbagai bidang tugas bank sentral (moneter, makroprudensial, sistem pembayaran), dan area spesifik lain seperti ekonomi dan keuangan syariah, ekonomi hijau,

Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT-PPSPM). Pada 2025, Bank Indonesia berhasil menjalin kerja sama bilateral dengan Banque de France (BdF) dan State Bank of Vietnam (SBV). Dengan bertambahnya kerja sama dengan kedua bank sentral tersebut, maka sejak diinisiasi pada 2015, Bank Indonesia telah menjalin kerja sama SBC dengan 15 bank sentral mitra, termasuk dengan Federal Reserve (The Fed), Bank of England (BoE), dan PBoC. Kerja sama bilateral ini dapat meningkatkan kapasitas Bank Indonesia, peluang kerja sama di bidang keuangan, serta mencerminkan peran *institutional leadership* Bank Indonesia di kawasan.

Kerja sama di bidang sistem pembayaran juga terus diperkuat guna mewujudkan konektivitas pembayaran antarnegara. Kerja sama pembayaran antarnegara dengan menggunakan QR code telah diimplementasikan dengan BoT, BNM, MAS, dan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang. Pada tataran regional ASEAN, kerja sama konektivitas pembayaran (RPC) juga terus diperluas. RPC pertama kali ditandatangani pada November 2022 oleh Bank Sentral ASEAN5 (Bank Indonesia, BNM, MAS, BoT, dan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)). Anggota RPC kini berjumlah sembilan negara dengan bergabungnya National Bank of Cambodia (NBC) pada April 2025. Konektivitas pembayaran antarnegara akan terus didorong untuk mewujudkan transaksi pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga dalam mengelola persepsi positif perekonomian Indonesia serta promosi investasi dan perdagangan. Sinergi dilakukan melalui *engagement* serta komunikasi intensif dengan lembaga pemeringkat dan *stakeholder* internasional. Bank Indonesia, sebagai sekretariat Investor Relation Unit (IRU) nasional, mengawal pengelolaan persepsi positif ekonomi Indonesia



sehingga peringkat *sovereign rating* Indonesia dapat dipertahankan pada satu level di atas *investment grade* dengan *outlook* stabil dari Moody's (Baa2), Standard & Poor (BBB), dan Fitch (BBB). Indonesia bahkan telah memperoleh peringkat dua level di atas *investment grade* (BBB+) dengan *outlook* stabil dari lembaga pemeringkat Jepang Rating and Investment Information, Inc. (R&I) dan Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR). Upaya menjaga persepsi *stakeholder* berperan penting dalam meningkatkan arus masuk modal asing pada instrumen portofolio dan investasi langsung. Fasilitas promosi investasi dan perdagangan melalui *linkage* IRU-Regional IRU (RIRU)-Global IRU (GIRU) terus diperkuat dengan strategi *synergized, targeted, dan outcome oriented*.

Reputasi Bank Indonesia di internasional semakin kuat, tecermin dari peran aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional. Selama 2025, Bank Indonesia berperan sebagai *Chair* pada forum *ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration* (SLC). Pertemuan ini mendiskusikan langkah memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta menyepakati arah strategis *ASEAN Economic Community Sectoral Plan for Financial Cooperation 2026–2030*. Bank Indonesia juga menjadi *Chair* pada *EMEAP Working Group on Banking Supervision* (WGBS) yang mendiskusikan perkembangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan Asia Pasifik. Dalam memimpin pertemuan *SEACEN Board of Governor's* (BOG) 2025, Bank Indonesia menggarisbawahi upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan melalui kolaborasi regional yang lebih erat di tengah ketidakpastian global, transformasi digital, dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Selain di kawasan regional, Indonesia juga berperan aktif pada forum kerja sama internasional seperti IMF, G20, Bank for International Settlements (BIS), termasuk forum syariah International Islamic Liquidity Management (IILM) dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Sejalan

dengan keanggotaan Indonesia dalam forum BRICS sejak Januari 2025, Bank Indonesia aktif dalam diskusi jalur keuangan. Forum ini menekankan pentingnya koordinasi kebijakan, penguatan multilateralisme, reformasi tata kelola global, dan kerja sama mengatasi risiko iklim. Keanggotaan Indonesia pada BRICS mencerminkan komitmen terhadap kerja sama multilateral yang membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas mitra strategis, serta memperkuat posisi geopolitik dan diplomatik melalui mekanisme kerja sama yang fleksibel dan setara. Dari aspek ekonomi dan perdagangan, Indonesia memperoleh akses pasar yang lebih luas pada pasar nontradisional, serta menarik investasi infrastruktur melalui National Development Bank (NDB) yang didirikan BRICS untuk pembiayaan infrastruktur.

Bank Indonesia memperoleh beberapa penghargaan internasional selama 2025. Central Banking Award memberikan penghargaan *Reserve Manager of the Year 2025*, atas transformasi *framework* pengelolaan cadangan devisa yang dinilai dapat meningkatkan *agility* dan fleksibilitas pengelolaan cadangan devisa di tengah ketidakpastian global. Bank Indonesia juga memperoleh *Best Systemic and Prudential Regulator in Asia Pacific 2025* dari the Asian Banker. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas keberhasilan implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif dan tepat sasaran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mengelola ekosistem keuangan digital. Selain itu, Bank Indonesia mendapatkan apresiasi *Innovation in Digital Currency* dari Currency Research. Peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga memperoleh penghargaan internasional sebagai *Best Central Banker of the Year 2025* dan *Best Central Bank for Facilitation & Support in Islamic Economy and Finance* pada ajang tahunan Global Islamic Finance Award (GIFA) 2025. *Contact Center "BICARA"* kembali mengukir prestasi dengan meraih penghargaan internasional pada kategori *Best Employee Engagement, Best Employee Wellness, Best Self-*



Service Technology, dan *Best Customer Service* pada ajang *Contact Center World Global Asia Pacific Top Ranking Performers Awards 2025*. Capaian ini mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam menghadirkan layanan terbaik bagi publik dan mendukung keterbukaan informasi. Dalam bidang manajemen sumber daya manusia, Bank Indonesia memperoleh penghargaan Perak dan Perunggu dalam Asia Pacific Stevie Award 2025. Berbagai penghargaan internasional mengukuhkan citra Bank Indonesia sebagai bank sentral terbaik di antara negara *emerging markets*.

3.8. Transformasi Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat transformasi yang telah ditempuh sejak 2018 guna memperkuat kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia dalam merespons lingkungan strategis yang berkembang. Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global dan nasional, serta berbagai perubahan lingkungan strategis lainnya, termasuk pergeseran demografi pegawai yang sekarang didominasi generasi milenial dan generasi Z. Dalam rangka merespons berbagai lingkungan strategis tersebut dan membangun bank sentral yang kredibel, profesional, bertata kelola, akuntabel, dan transparan, Bank Indonesia mempertajam sejumlah agenda transformasi dan mengimplementasikannya secara bertahap.

Pada area kebijakan, Bank Indonesia melanjutkan penguatan pengaturan Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung untuk mencapai tujuan yang diamanatkan UU. Penguatan ini disertai dengan *Business Process Re-engineering* (BPR) serta dilakukan pada berbagai fungsi kebijakan yang mencakup pengembangan *blueprint framework*, instrumen, dan infrastruktur. Di bidang moneter, penguatan dilakukan antara

lain melalui reformasi regulasi moneter melalui penyempurnaan pengaturan yang selaras dengan BKBI, serta pengembangan digitalisasi proses bisnis statistik. Di bidang makroprudensial, Bank Indonesia melakukan reformasi regulasi makroprudensial melalui penguatan pengaturan terkait pengelolaan likuiditas perbankan dan perekonomian. Bank Indonesia juga terus memperkuat perumusan kebijakan makroprudensial, antara lain melalui penyusunan kerangka kerja/konsepsi makroprudensial. Pada bidang sistem pembayaran, reformasi regulasi dilakukan antara lain melalui penerbitan ketentuan yang relevan guna mendukung stabilitas, efisiensi, dan integrasi sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia juga secara berkelanjutan melakukan transformasi sistem pembayaran sejalan dengan BSPI 2025-2030 yang mencakup pengembangan infrastruktur, termasuk infrastruktur data, untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan digital, penguatan daya saing industri, pengembangan inovasi dan perluasan akseptasi, pengembangan konektivitas sistem pembayaran lintas negara, serta pengembangan Rupiah Digital.

Bank Indonesia terus melakukan transformasi kelembagaan secara menyeluruh untuk membangun lembaga bank sentral yang kredibel, profesional, bertata kelola kuat, dan transparan. Transformasi bauran kebijakan, tata kelola kelembagaan, organisasi dan proses kerja, SDM, dan digital yang telah ditempuh sejak 2018 terus diperkuat dan dipertajam, terutama untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia di era digital, sekaligus memastikan kapasitas yang lebih tangguh dalam mengawal perekonomian nasional dari dampak gejolak global, serta mengimplementasikan mandat UU Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU P2SK. Penguatan transformasi kelembagaan berfokus pada 3 (tiga) agenda pokok. *Pertama*, penguatan sistem tata kelola kebijakan bank sentral dan tata kelola kelembagaan dengan berdasarkan prinsip independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi



(IKKAT). *Kedua*, digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan menuju visi sebagai bank sentral digital terdepan. *Ketiga*, penguatan kepemimpinan Bank Indonesia yang profesional dengan kompetensi tinggi (*book-smart*), pengalaman kuat (*street-smart*), dan berakhlak mulia (*spiritual smart*) melalui program budaya kerja “Aku Bangga BI Bermakna” (AB3). Bank Indonesia juga akan terus memperkuat akuntabilitas kelembagaan kepada DPR-RI dan mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, dan penguatan transparansi publik.

Pertama, Bank Indonesia senantiasa mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan profesional sesuai amanat UU melalui sistem tata kelola kebijakan bank sentral dan tata kelola kelembagaan yang berdasarkan prinsip Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi (IKKAT). Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bank Indonesia diberikan independensi oleh UU dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kebijakannya sebagai bank sentral, yaitu di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial. Kewenangan Bank Indonesia tersebut diterapkan secara konsisten dalam proses perumusan kebijakan yang bertata kelola dalam forum RDG Bulanan, serta senantiasa dilakukan evaluasi pelaksanaannya dalam forum RDG Mingguan. Lebih lanjut sejalan dengan prinsip koordinasi, Bank Indonesia senantiasa berkomitmen kuat untuk melakukan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah dalam mewujudkan stabilitas dan pertumbuhan perekonomian nasional. Bank Indonesia juga menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas termasuk melalui penyampaian laporan kinerja kelembagaan kepada Presiden dan DPR-RI, serta prinsip transparansi publik antara lain melalui konferensi pers secara bulanan atas kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam RDG Bulanan dan publikasi laporan-laporan pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia.

Keseimbangan kelima prinsip ini diimplementasikan melalui strategi perumusan, strategi pelaksanaan, dan strategi pengendalian untuk kebijakan utama dan kebijakan kelembagaan. Penerapan strategi untuk tata kelola kebijakan dituangkan dalam kerangka bauran kebijakan utama yang mengintegrasikan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial, yang diperkuat dengan kebijakan pendukung, untuk pencapaian tujuan Bank Indonesia yang optimal sesuai amanat UU Bank Indonesia. Sementara itu, penerapan strategi dalam tata kelola kelembagaan dituangkan dalam kerangka bauran kebijakan kelembagaan yang mengintegrasikan rencana strategis dan program kerja serta proses bisnis dan organisasi Bank Indonesia agar dapat diimplementasikan secara optimal, dengan tata kelola yang baik dan profesional, serta didukung dengan penggunaan sumber daya secara terukur. Penguatan kerangka bauran kebijakan kelembagaan dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh elemen kelembagaan Bank Indonesia mampu mendukung pencapaian tujuan institusi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip kepatuhan. Bank Indonesia juga telah melengkapi berbagai ketentuan di area kebijakan dan kelembagaan yang diperlukan untuk pelaksanaan strategi dimaksud.

Dalam rangka implementasi strategi di area kebijakan utama dan kelembagaan (Gambar 3.5.), Bank Indonesia menerapkan sistem perencanaan strategis jangka menengah dan tahunan. Perencanaan strategis dirumuskan berlandaskan tujuan dan tugas dalam UU Bank Indonesia, visi dan misi Bank Indonesia, serta arahan dan pandangan ke depan (*strategic foresight*) secara kolektif dari Dewan Gubernur. Perencanaan strategis jangka menengah dijabarkan ke dalam Rencana Bisnis Strategis (RBS) Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RBS menjadi dasar untuk penyusunan rencana kerja tahunan Bank Indonesia, yang prosesnya didasarkan pada Arahan Tahunan Gubernur Bank Indonesia (ATGBI). Hasil

Gambar 3.5. Sistem Perencanaan Strategis Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

perencanaan strategis Bank Indonesia selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh satuan kerja dalam forum komunikasi lingkup Bank Indonesia.

Lebih lanjut, guna mewujudkan tata kelola yang baik dan profesional dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan tentang sistem pengambilan keputusan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Pengambilan Keputusan di Bank Indonesia dan Peran Anggota Dewan Gubernur (PDG SPK) yang merupakan penyempurnaan atas PDG Nomor 24/5/PDG/2022 tentang Pengambilan Keputusan di Bank Indonesia dalam Era Digital, kebijakan Bank Indonesia terdiri atas kebijakan bank sentral dan kebijakan kelembagaan. Adapun keputusan di Bank Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu Kebijakan Prinsipil dan Strategis, Implementasi Kebijakan Prinsipil dan Strategis, dan Kebijakan yang Tidak Dinyatakan Prinsipil dan Strategis. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara adaptif dan *streamlined* melalui penerapan prinsip 3S (Simplifikasi, Standarisasi, dan Sistemisasi). Di samping itu, dalam ketentuan

dimaksud diatur mengenai peran Anggota Dewan Gubernur, yaitu (i) dalam Rapat Dewan Gubernur, (ii) dalam Komite, (iii) sebagai pengarah program strategis dan program transformasi, dan (iv) sebagai koordinator pelaksanaan tugas operasional Satuan Kerja.

Dewan Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur berkomitmen penuh memimpin pencapaian kinerja Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diwujudkan melalui perumusan dan pengambilan kebijakan strategis dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG). Sesuai UU BI, RDG adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis. Untuk memperkuat tata kelola dan kualitas kebijakan, proses perumusannya dilakukan secara berjenjang dengan menekankan adanya *check and balance* melalui tahapan inisiasi, verifikasi, rekomendasi, dan persetujuan. Tahapan inisiasi dan verifikasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja, baik oleh Pemimpin satuan kerja maupun melalui Rapat Pimpinan satuan kerja. Selanjutnya, tahapan rekomendasi dilakukan oleh Komite melalui Rapat Komite dan tahapan persetujuan



dilaksanakan dalam RDG. Pengambilan keputusan dalam RDG dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menerapkan prinsip kolektif kolegial.

Kedua, Bank Indonesia akan mempercepat proses digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan yang mengutamakan tata kelola, *streamlined* proses, *collaborative work*, didukung dengan pengembangan pusat data serta kapabilitas *Artificial Intelligence* (AI). Bank Indonesia secara konsisten mendorong transformasi digital melalui pengembangan *digital business platform*, pengembangan pusat data dan AI, serta peningkatan kapabilitas teknologi dan pengamanan secara *end-to-end*. Pengembangan *digital business platform*, yang menjadi fondasi utama modernisasi proses bisnis kebijakan dan kelembagaan, berfokus pada digitalisasi sistem pembayaran dan proses pengambilan keputusan strategis, yang terus diperkuat sepanjang tahun 2025. Inisiatif digitalisasi sistem pembayaran diwujudkan melalui perluasan fitur BI-FAST yang semakin inklusif serta eksplorasi inovasi Rupiah Digital dalam kerangka Proyek Garuda sebagai respons terhadap dinamika sistem keuangan digital global. Sejalan dengan itu, transformasi juga dilakukan pada tata kelola dan efektivitas proses pengambilan keputusan melalui pengembangan platform *digital workplace* (DWP) sebagai media pendukung pelaksanaan RDG. Platform ini diimplementasikan secara bertahap untuk memperkuat integrasi informasi, mempercepat proses analisis, dan meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan. Digitalisasi proses kerja dimaksud terus diperkuat dengan tetap mengedepankan tata kelola, serta kolaborasi proses kerja antar-satuan kerja/unit kerja sejalan dengan prinsip *one input, one process*, dan *multi purposes*.

Bank Indonesia terus melanjutkan pengembangan Pusat Data sebagai bagian dari inovasi digital yang mendukung ekonomi digital serta proses bisnis kebijakan dan kelembagaan. Pusat Data menjadi *epicentrum of change* dari transformasi digital Bank Indonesia dengan langkah nyata untuk mewujudkan institusi berbasis data (*Data-Driven Institution*)

yang mampu memanfaatkan AI dan *Machine Learning* (ML) dalam pengambilan keputusan. Pengembangan ini mencakup dua besaran utama, yakni sebagai katalisator proses bisnis dan penguatan kapabilitas pusat data, yang diwujudkan melalui pendekatan *end-to-end* mulai dari demokratisasi data dengan memanfaatkan metadata, otomasi aliran dan pengolahan data (*data factory*), eksperimentasi inovasi data, serta eksplorasi teknologi data termasuk pengembangan model ML/AI (*data innovation*) dan pengembangan solusi teknologi *Omnidata Intelligence Platform*.

Bank Indonesia juga secara konsisten mendorong peningkatan kapabilitas infrastruktur teknologi dalam rangka memperkuat sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan ketahanan dan keamanan siber melalui adopsi teknologi terkini, penerapan sertifikasi, serta optimalisasi monitoring terhadap infrastruktur yang dimiliki. Penerapan inovasi teknologi baru maupun peremajaan terhadap infrastruktur yang telah berjalan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kualitas, stabilitas, dan ketersediaan layanan SI tetap terjaga dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan organisasi. Di samping itu, Bank Indonesia juga memperkuat aspek tata kelola melalui penyusunan regulasi terkait keamanan sistem informasi dan ketahanan siber yang berlaku bagi seluruh penyelenggara sistem pembayaran, pelaku pasar uang, pasar valuta asing, maupun pihak lain yang diawasi oleh Bank Indonesia, sebagai langkah strategis untuk membangun ekosistem keuangan yang aman dan tangguh secara digital.

Ketiga, penguatan kepemimpinan yang profesional dengan kompetensi tinggi, pengalaman kuat, dan berakhlak mulia melalui program budaya kerja “Aku Bangsa BI Bermakna” (AB3). Bank Indonesia terus mendorong SDM yang berkinerja tinggi dan berakhlak mulia guna mewujudkan visi menjadi bank sentral digital terdepan. Pengelolaan SDM juga diarahkan untuk menciptakan calon pemimpin Bank Indonesia yang profesional, dengan memiliki aspek *3-Smart*, yaitu:



berkompetensi (*book smart*), berpengalaman (*street smart*), dan berperilaku mulia (*spiritual smart*), melalui 9 (sembilan) program yang terbagi ke dalam tiga pilar, yaitu kepemimpinan, kekeluargaan, dan kesejahteraan. Selain itu, Bank Indonesia terus berupaya mengembangkan suasana, hubungan, dan fasilitas kerja *modern office* yang lebih mendukung digitalisasi dan juga perilaku pegawai milenial.

Di tengah perubahan lingkungan strategis dan peningkatan komposisi pegawai pada Gen Y dan Z, Bank Indonesia terus mendorong pengembangan kapabilitas pegawai sebagai *engine of change* organisasi. Upaya ini dilakukan melalui strategi pemenuhan dan pemeliharaan SDM serta penguatan *Employee Value Proposition* (EVP) 3.0. EVP 3.0 menjadi salah satu prioritas transformasi kebijakan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan *engagement* pegawai Bank Indonesia. Hal ini meliputi program remunerasi kompetitif, pemeliharaan kesehatan dengan fokus pada kesehatan fisik, dan pensiun tenang dengan fokus pada program pensiun berkah.

Pengembangan kapabilitas digital bagi SDM merupakan bagian penting dari transformasi SDM dan budaya kerja di Bank Indonesia.

Kapabilitas ini diperlukan untuk mendukung digitalisasi proses kerja dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Untuk mendukung hal tersebut, Bank Indonesia telah membentuk desain dan modul pembelajaran berbasis konsepsi kurikulum Bank Sentral Digital. Di samping itu, penguatan kompetensi SDM juga ditekankan pada bidang *data science*, *data analytics*, dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelaksanaan tugas bank sentral, serta memperluas penguasaan terhadap ekonomi dan keuangan hijau sebagai bagian dari penguatan peran strategis Bank Indonesia di era transformasi digital dan keberlanjutan. Infrastruktur pembelajaran diperkuat melalui *Learning Management System* (LMS) dan *Digital/Cyber Library* yang terus dikembangkan, antara lain melalui pengayaan modul *e-learning* dari internal Bank Indonesia maupun mitra kerja. Di samping itu, Bank Indonesia juga terus mendorong penguatan riset pendukung kebijakan antara lain melalui pengelolaan jurnal internasional.



Boks
3.1.

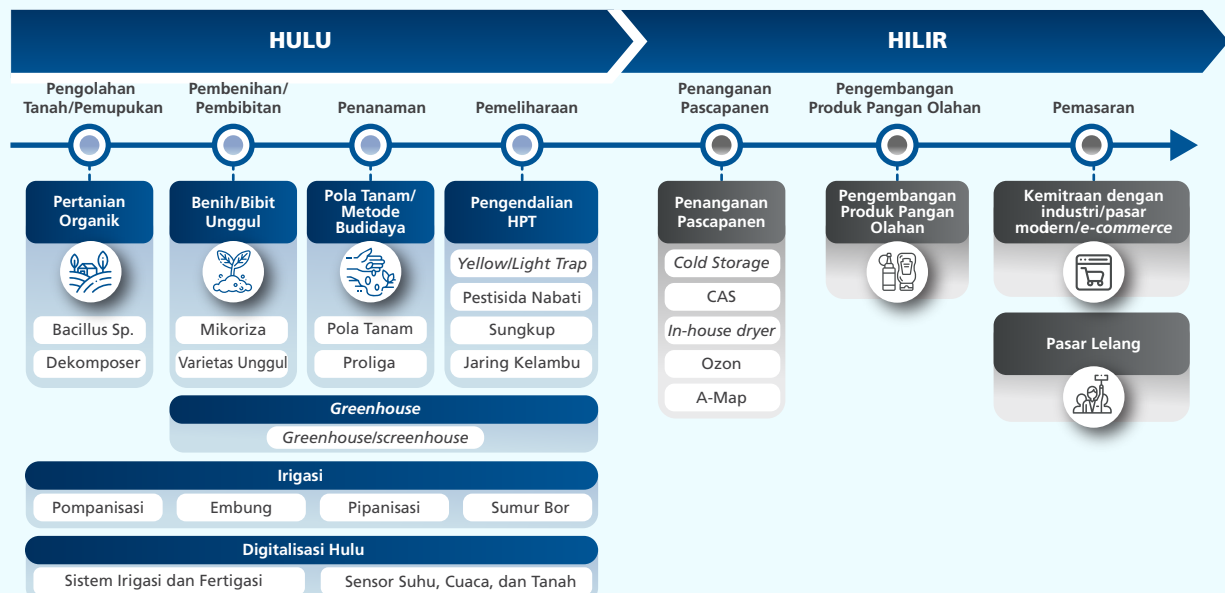
Pengembangan Klaster Pangan untuk Mendukung Stabilitas Harga

Salah satu upaya mendukung pelaksanaan mandat Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah ialah bersinergi menjaga stabilitas harga pangan bergejolak yang antara lain diwujudkan melalui pengembangan klaster pangan. Pengembangan klaster pangan Bank Indonesia sejak tahun 2014 difokuskan pada komoditas yang mendukung ketahanan pangan dan komoditas sumber tekanan inflasi *volatile foods*. Melalui program pengembangan klaster pangan, kapasitas UMKM diharapkan dapat meningkat untuk memperkecil *gap* antara *supply* dan *demand* yang selanjutnya dapat mengurangi tekanan harga pangan yang mendorong inflasi. Selain itu, program klaster juga bertujuan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena melibatkan banyak petani dan UMKM.

Pengembangan model bisnis klaster pangan dilakukan secara *end-to-end* dan diarahkan pada peningkatan produktivitas, intensifikasi, serta hilirisasi. Hal ini dilakukan melalui replikasi *best practice* klaster pangan dari hulu (budidaya) hingga ke hilir (pengolahan pascapanen dan kemitraan dengan *offtaker*/ industri)-(Gambar B3.1.1.). Pengembangan UMKM pangan strategis juga dilakukan dengan mendorong pemanfaatan teknologi digital berbasis *internet of things* (*digital farming*) untuk meningkatkan produktivitas serta memperluas akses pemasaran dan efisiensi rantai distribusi komoditas pertanian.

Salah satu contoh *success story* model bisnis klaster pangan yang telah mengimplementasikan *best practice* yaitu klaster cabai di Jawa Barat. Di sisi hulu, klaster telah menerapkan praktik pertanian

Gambar B3.1.1. Pengembangan Model Bisnis Klaster Pangan Hulu-Hilir



Sumber: Bank Indonesia

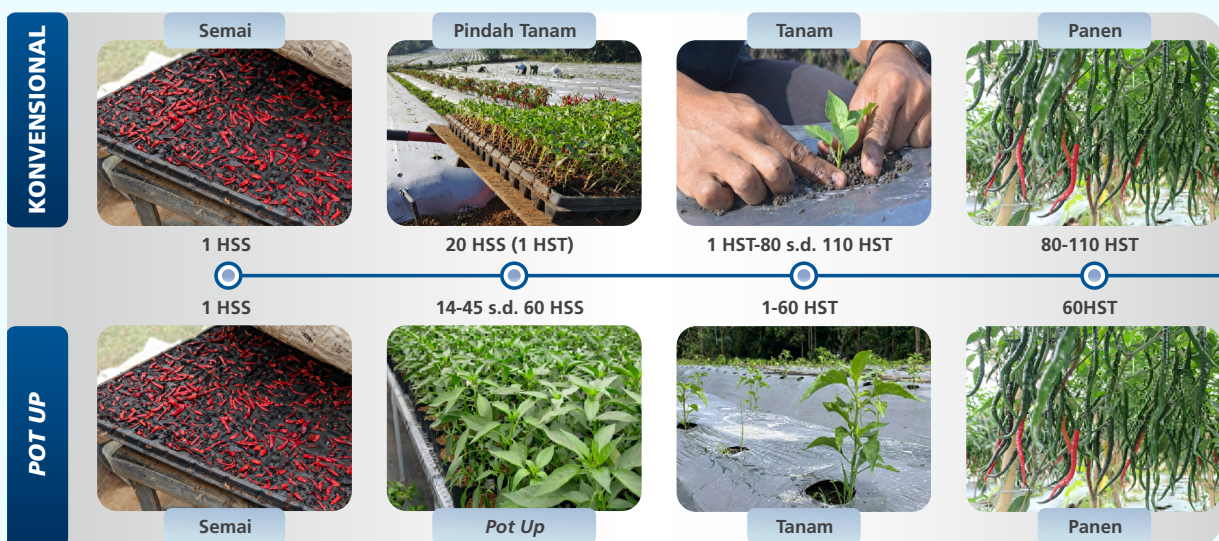


berkelanjutan melalui penggunaan pupuk dan pestisida organik serta pemanfaatan limbah, *digital farming* (pemanfaatan teknologi digital dalam budidaya pertanian) berupa *smart fertigation* dan *smart irrigation*, dan penggunaan bibit unggul. Klaster juga mengimplementasikan inovasi metode *Pot Up* dengan bantuan *smart green house*. Sistem *pot up* merupakan metode budidaya dimana bibit hasil semai disimpan di dalam pot atau wadah yang diletakkan di *green house* sebelum dilakukan pindah tanam. Umumnya pindah tanam dilakukan pada 20 Hari Setelah Semai (HSS), namun dengan metode *pot up* pindah tanam dilakukan setelah usia tanaman lebih besar (45–60 HSS). Dengan demikian, waktu hari tanam menjadi lebih singkat yaitu 60 Hari Setelah Tanam (HST), jika dibandingkan metode konvensional yang membutuhkan 80–110 HST (Gambar B3.1.2.). Melalui metode *pot up*, biaya budidaya dapat lebih efisien dan petani dapat melakukan persemaian lebih cepat ketika *off season* sebelum hujan tiba. Dengan berbagai implementasi dan *best practice* yang dilakukan, produktivitas klaster cabai kini mencapai lebih dari 15 ton per hektar

di atas rata-rata nasional 9,1 ton/ha. Di sisi hilir, pengelolaan pascapanen pada klaster ini telah memenuhi standar yang meliputi sortasi, *grading*, *packing*, pencucian, pengeringan, dan pengendalian mutu (*quality control*). Selain itu, pengelolaan pascapanen juga telah tersertifikasi Prima 3 yaitu sertifikasi yang menunjukkan bahwa produk hortikultura telah dikelola secara profesional, aman dikonsumsi, dan siap dipasarkan secara luas. Selain itu, klaster juga telah melakukan hilirisasi dengan menghasilkan produk turunan seperti cabai kering dan cabai bubuk, yang dipasarkan melalui lebih dari lima mitra pemasaran, di antaranya pasar modern dan *platform online*.

Klaster pangan turut berkontribusi dalam pengendalian inflasi daerah melalui partisipasi pada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Klaster berperan aktif dalam kegiatan operasi pasar dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, klaster dengan pihak swasta juga berinisiatif dalam kerja sama program promo mingguan untuk tujuan yang sama, yaitu pengendalian harga pangan.

Gambar B3.1.2. Perbandingan Metode Konvensional dan Metode Pot Up



HSS: Hari Setelah Semai HST: Hari Setelah Tanam
Sumber: Bank Indonesia



Boks
3.2.

Inovasi Strategi Operasi Moneter *Pro-Market* untuk Akselerasi Pendalaman dan Peningkatan Efisiensi Pasar Keuangan

Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030 yang terintegrasi dengan Operasi Moneter (OM) *Pro-Market* disusun untuk menavigasi arah pendalaman PUVA dalam mewujudkan PUVA yang modern dan maju. Penyusunan BPPU 2030 merupakan respons terhadap dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang, termasuk meningkatnya ketidakpastian global akibat kebijakan proteksionis Amerika Serikat yang menimbulkan implikasi signifikan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global. Sejalan dengan penguatan mandat Bank Indonesia dalam Undang-Undang P2SK, visi BPPU diarahkan untuk membangun PUVA yang modern dan maju serta terintegrasi dengan OM *Pro-Market* guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pembiayaan perekonomian nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, Bank Indonesia menempuh berbagai langkah strategis, salah satunya melalui penguatan operasi moneter yang memiliki tujuan di antaranya memperkuat mekanisme pasar sehingga dapat meningkatkan aktivitas transaksi dan memperdalam likuiditas pasar uang dan pasar valas.

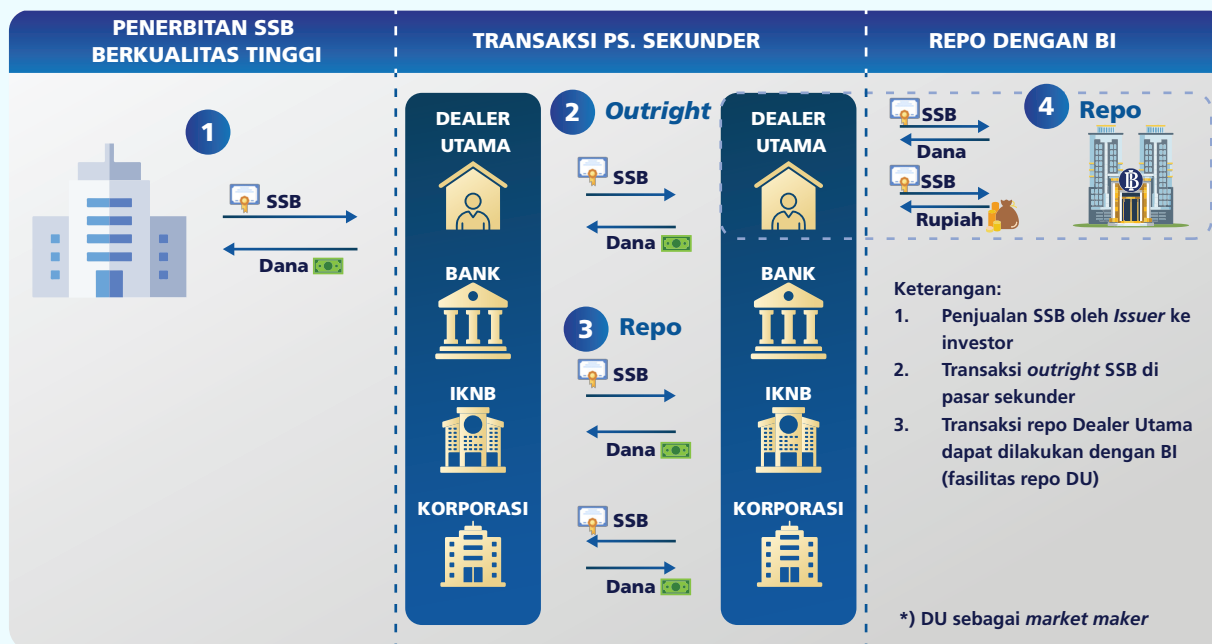
Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi OM *Pro-Market* melalui tiga inovasi termasuk dari sisi instrumen yang dirancang untuk mengakselerasi pendalaman dan meningkatkan efisiensi pasar. *Pertama*, Bank Indonesia memperluas jenis *underlying* repo dalam operasi moneter melalui surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas ketersediaan aset likuid sekaligus mendukung Pemerintah dalam program pembiayaan bagi kesejahteraan

masyarakat. *Kedua*, Bank Indonesia mendorong perkembangan *Overnight Index Swap* (OIS) *market* melalui penerbitan *Floating Rate Note* (BI-FRN) dan fasilitasi *matchmaking* OIS untuk memperkuat pembentukan struktur suku bunga yang berbasis transaksi di pasar uang. *Ketiga*, dalam rangka memperdalam pasar uang syariah, Bank Indonesia melakukan perluasan basis investor Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) sehingga instrumen tersebut dapat dimiliki oleh bank dan nonbank, termasuk penduduk dan bukan penduduk di pasar sekunder.

Pada inovasi pertama yakni perluasan *underlying* OM Repo dengan surat berharga berkualitas tinggi, berupa obligasi atau sukuk yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan Pemerintah, merupakan langkah strategis dalam menyediakan produk PUVA yang lebih variatif dan likuid guna mendukung pendalaman PUVA dan pembiayaan perekonomian. Selama ini, preferensi perbankan membeli surat berharga korporasi sebagai *yield enhancement* dan *inventory* dengan kecenderungan *hold to maturity* telah menghambat potensi peningkatan transaksi di pasar sekunder. Kondisi ini tecermin dari data KSEI yang menunjukkan *outstanding* obligasi korporasi mencapai Rp446,3 triliun per September 2025, dengan porsi kepemilikan masih didominasi oleh perbankan. Inisiatif perluasan *underlying* OM Repo menjadi katalis penting untuk mengoptimalkan peran obligasi korporasi berkualitas tinggi sebagai *underlying* repo, baik untuk operasi moneter maupun transaksi antarpelaku di pasar uang (Gambar B3.2.1.). Implementasi inisiatif ini dilakukan secara bertahap diawali dengan obligasi korporasi dan sukuk korporasi untuk selanjutnya diperluas ke Efek Beragun Aset (EBA). Langkah ini didukung oleh penetapan besaran *haircut* yang terukur atas surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang dievaluasi secara berkala



Gambar B3.2.1. Pengembangan SSB Berkualitas Tinggi sebagai *Underlying* Transaksi Repo



Sumber: Bank Indonesia

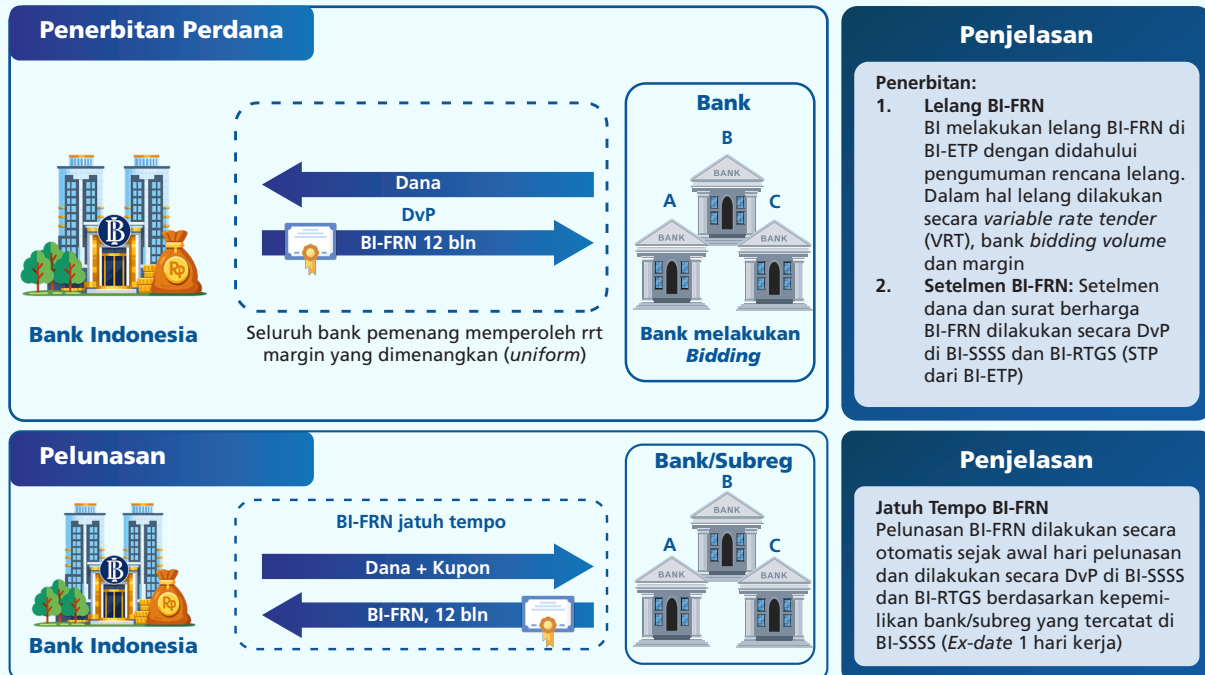
sehingga mendukung manajemen risiko. Dari sisi *participant*, Dealer Utama PUVA memegang peranan penting sebagai *eligible participant*, mengingat perannya sebagai *market maker* dan mendorong distribusi likuiditas di PUVA. Infrastruktur pendukung diperkuat untuk mendukung implementasi inisiatif, meliputi: (i) pengembangan BI-Electronic Trading Platform (BI-ETP), (ii) penambahan layanan *Tri-Party Agent Repo* (TPA Repo) oleh *Central Counterparty* (CCP), serta (iii) pengembangan BI-SSSS. Dengan langkah strategis Bank Indonesia ini, obligasi dan sukuk korporasi diharapkan menjadi lebih likuid sehingga dapat mendorong akselerasi transaksi sekaligus menciptakan pendalaman PUVA yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada inovasi kedua, pengembangan BI-FRN dan *Overnight Indeks Swap* (OIS) sebagai instrumen OM *pro-market* merupakan bagian dari *regulatory-led strategy* yang bertujuan menghadirkan inovasi produk pasar uang yang lebih beragam sekaligus memperkuat fondasi pembentukan struktur suku bunga (*term structure*) berbasis transaksi di pasar uang. Sebagai instrumen (*product*) pasar uang berbasis INDONIA, di tahap awal penerbitan

BI-FRN dengan kupon mengambang akan meningkatkan eksposur pelaku pasar terhadap dinamika pergerakan suku bunga sehingga mendorong kebutuhan lindung nilai (*hedging*) melalui OIS (Gambar B3.2.2.). Peningkatan volume transaksi OIS diharapkan memperkuat proses pembentukan harga (*pricing*) di pasar uang dan melengkapi *term-structure* untuk tenor hingga 12 bulan yang selanjutnya menjadi basis pembentukan *money market curve* yang kredibel dan berfungsi sebagai referensi harga di pasar. Penerbitan BI-FRN diharapkan dapat mendorong penerbitan surat berharga di *market* menggunakan kupon yang berbasis transaksi di pasar uang. Dari sisi *participant*, Dealer Utama PUVA memainkan peran kunci sebagai *market maker* di pasar OIS melalui penyediaan kuota dua arah untuk memperkuat fungsi *price discovery* yang efisien dan transparan. Sejalan dengan inisiatif tersebut, sejak November 2025 Bank Indonesia memfasilitasi *matchmaking* OIS yang merupakan proses pencocokan penawaran (*bid/ask*) transaksi OIS yang disampaikan oleh pelaku pasar kepada Operator *Matchmaking* OIS dengan metode yang ditetapkan Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya, perusahaan pialang sebagai sarana transaksi



Gambar B3.2.2. Mekanisme Transaksi BI-FRN



Sumber: Bank Indonesia

antarbanc, memegang peranan penting dalam memastikan proses *matchmaking* berjalan efektif. Selain itu, infrastruktur pasar keuangan juga diperkuat melalui pengembangan BI-ETP dan BI-SSSS guna mendukung penerbitan BI-FRN. Keseluruhan Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan efektivitas suku bunga rupiah untuk mendukung pendalaman pasar uang guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Terakhir untuk inovasi ketiga, perluasan basis investor SUKBI merupakan langkah untuk memperluas akses kepemilikan dan transaksi SUKBI di pasar sekunder guna mendukung kebijakan OM *Pro-Market*. Bank Indonesia melakukan penguatan fitur SUKBI sebagai instrumen utama OM syariah sejak 2018 sehingga dapat dimiliki dan ditransaksikan oleh bank dan/atau nonbank (penduduk/ bukan penduduk) di pasar sekunder. Dari sisi *product*, SUKBI dikembangkan sebagai instrumen OM *pro-market* yang likuid, dengan karakteristik antara lain menggunakan *underlying* SBSN dan/atau sukuk global milik Bank Indonesia, tenor 1 hari–12 bulan, tanpa

warkat, dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan diterbitkan menggunakan akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*. Pada aspek *pricing*, harga yang terbentuk di *market* sejalan dengan *stance* kebijakan moneter. Dari sisi *participant*, pelaku meliputi BUS, UUS, BUK, dengan pengembangan fitur baru berupa bank dan/atau nonbank, termasuk penduduk dan bukan penduduk di pasar sekunder. Pada aspek *infrastructure*, penguatan dilakukan dari mulai sistem pendukung *front-to-end* yang 3I (interkoneksi, integrasi, interoperabilitas), termasuk penatausahaan melalui BI-SSSS untuk investor nonbank, penyediaan kode ISIN SUKBI oleh KSEI, penyediaan Harga Pasar Wajar (HPW) SUKBI oleh Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), dan penegasan perlakuan pajak di pasar sekunder melalui koordinasi dengan otoritas terkait. Dengan penguatan fitur SUKBI tersebut, diharapkan efektivitas SUKBI sebagai instrumen OM *pro-market* meningkat sejalan dengan meningkatnya transaksi SUKBI di pasar sekunder sebagai *high quality liquid asset* (HQLA) dan mendorong *capital inflows* untuk mendukung stabilitas nilai tukar.



Boks
3.3.

Hackathon: Pengembangan *Digital Talent* untuk Mendorong Inovasi dalam Ekosistem Ekonomi-Kuangan Digital

Pengembangan *digital talent* menjadi fondasi dalam membangun ekosistem ekonomi keuangan digital yang inovatif. Upaya ini memerlukan wadah yang tidak hanya mendorong kreativitas dan kolaborasi lintas sektor, tetapi juga mampu menghasilkan solusi digital yang selaras dengan kebutuhan pasar. Inisiatif seperti Hackathon terbukti efektif menstimulus kreativitas dan ide-ide inovatif, sementara pelatihan dan sertifikasi melalui *platform* pembelajaran maupun *digital innovation hubs* berperan dalam meningkatkan kapasitas teknis serta memperluas inovasi digital ke layanan keuangan secara lebih luas (Kamariotou & Kitsios, 2022; Gumbo, E., & Moos, M., 2024).

Sejak tahun 2024, Bank Indonesia menyelenggarakan kompetisi Hackathon untuk pengembangan *digital talent* melalui perluasan jumlah kepesertaan dalam menjaring ide inovatif dan talenta potensial di bidang ekonomi dan keuangan digital. Hackathon menjadi wadah pengembangan eksplorasi ide, *use case*, dan talenta yang bersinergi dengan mitra, asosiasi, dan komunitas untuk mendorong terbentuknya ekosistem keuangan digital yang lebih inovatif. Pada tahun 2025, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Hackathon berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI-OJK Hackathon 2025 dirancang menjadi *proof of concept* operasionalisasi dari Pusat Inovasi Digitalisasi Indonesia (PIDI), yaitu sebagai pusat kolaborasi, eksperimen, dan pengembangan inovasi digital ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional.

BI-OJK Hackathon 2025 mengusung tema utama *Empowering the Future: Innovating Digital Services and Financial Solutions for Inclusive Growth and Resilient Economy*. Terdapat 3 (tiga) *problem statements* yang menjadi fokus utama dalam pencarian inovasi: 1) *AI as a Service (AlaaS) for Digital Delivered Service Export (DDSE)*; 2) *Financial Innovation & Public Services*; dan 3) *Risk Management & Consumer Protection*. Tiga tema tersebut dirancang untuk memperkuat inovasi digital nasional. *AI as a Service (AlaaS) for DDSE* mendorong pemanfaatan AI untuk ekspor layanan digital melalui pembelajaran adaptif, keamanan siber, *chatbot* multibahasa, dan *settlement* lintas batas. *Financial Innovation & Public Services* berfokus pada pemanfaatan AI/ML untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan, mendukung profil kredit UMKM, serta mengoptimalkan layanan publik seperti bansos. *Risk Management & Consumer Protection* diarahkan untuk memperkuat mitigasi risiko transaksi, pencegahan *fraud*, *audit smart contract*, serta analisis aset digital guna menjaga integritas dan keandalan sistem pembayaran.

Rangkaian kompetisi dimulai dari April hingga September 2025 yang diikuti oleh masyarakat dari kalangan profesional dan mahasiswa. *Kick-off* dan *roadshow* dilaksanakan pada April hingga Juni 2025 untuk membuka registrasi dan seminar teknis, yang dilanjutkan dengan pengembangan prototipe, *coaching*, dan penilaian final hingga Juli–Agustus 2025. Seleksi finalis dan *final submission* prototipe menandai fase kurasi inovasi sebelum

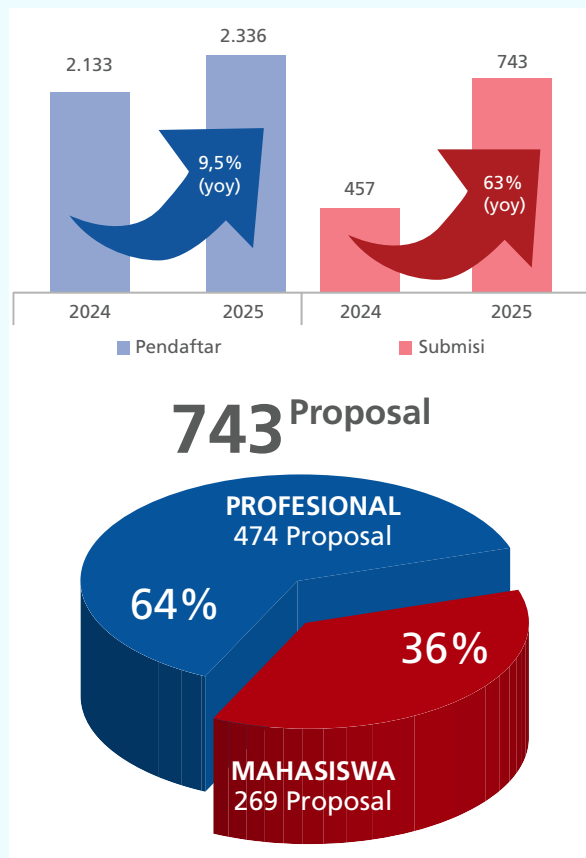


memasuki sesi *showcasing* dan kemudian dilanjutkan oleh proses *business matching* pada Agustus–September 2025.

Hasil penyelenggaraan BI-OJK Hackathon 2025 mencatat peningkatan dibandingkan tahun 2024, baik dari jumlah pendaftar maupun proposal yang masuk. Jumlah pendaftar mencapai 2.336 peserta, tumbuh 9,5% (yoy), sementara proposal yang diterima mencapai 743 atau meningkat sebesar 63%. Berdasarkan komposisi jenis peserta, 64% proposal yang masuk berasal dari kalangan profesional dan 36% dari mahasiswa (Grafik B3.3.1.).

Dari proses seleksi berjenjang, terpilih 30 semifinalis dan selanjutnya diputuskan 10 finalis dengan fokus inovasi yang selaras dan mendukung mandat kebijakan Bank Indonesia, antara lain *Digitally Delivered*

Grafik B3.3.1. Pendaftar dan Submisi Proposal BI-OJK Hackathon 2025

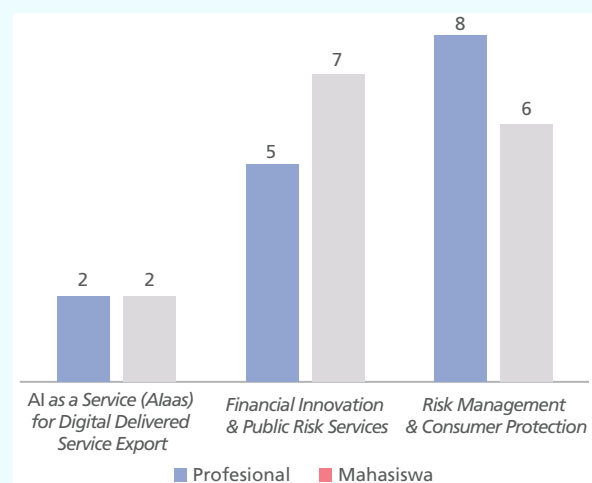


Sumber: Bank Indonesia

Service Export (DDSE), perlindungan konsumen, Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), hingga penguatan keamanan sistem pembayaran (Grafik B3.3.2.). Pada kategori profesional, inovasi meliputi *enterprise knowledge platform*, *chatbot* untuk UMKM, deteksi penipuan berbasis WhatsApp, monitoring pembangunan infrastruktur publik, dan sistem *fraud detection real-time*. Sementara itu, kategori mahasiswa menampilkan solusi berbasis AI untuk transparansi bansos, literasi finansial anak, otomasi dokumen dan *matching* ekspor UMKM, deteksi penipuan kripto berbasis analisis *on-chain*, serta akselerasi audit *smart contract*.

Melalui pendekatan yang *end-to-end* mulai dari eksplorasi ide, pengembangan prototipe, hingga *business matching*, Hackathon telah berhasil menghasilkan *proof of concept* inovasi yang siap diimplementasikan. Ke depan, penguatan kesinambungan hasil Hackathon serta integrasinya dengan inisiatif Pusat Inovasi Digitalisasi Indonesia (PIDI) diharapkan dapat mempercepat adopsi dan skalabilitas solusi inovatif yang efektif dalam menjawab berbagai tantangan sistem pembayaran ke depan.

Grafik B3.3.2. Problem Statement Semifinalis



Sumber: Bank Indonesia



Boks
3.4.

Sinergi Perluasan Penggunaan Mata Uang Lokal
Mendukung Pendalaman Pasar Keuangan Domestik

Kerja sama penggunaan mata uang lokal (*Local Currency Transaction* atau LCT) menjadi salah satu inisiatif strategis untuk mendorong diversifikasi mata uang dan memperkuat stabilitas nilai tukar. Di tengah ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung, transaksi ekonomi intra-Asia makin meningkat. Jepang dan Tiongkok memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Indonesia, sebagaimana tecermin dari posisi tiga besar kedua negara, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun negara asal impor (rerata 2020-2024, Tabel B3.5.1. dan Tabel B3.5.2.). Namun demikian, pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi regional masih relatif terbatas dan didominasi *hard currency*, sehingga meningkatkan eksposur terhadap nilai tukar. Hal ini mempertegas relevansi kerja sama LCT dengan negara-negara mitra utama seperti Tiongkok dan Jepang. Kerja sama LCT mendorong diversifikasi mata uang dalam transaksi ekonomi dan keuangan sehingga mendukung peningkatan efisiensi biaya transaksi, memperlancar perdagangan dan investasi, serta mempermudah transaksi *cross-border* dan integrasi keuangan. Kerja sama LCT tersebut pada akhirnya dapat memperkuat stabilitas nilai tukar sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Tabel B3.4.1. Tiga Besar Negara Tujuan Ekspor Indonesia

No.	Negara	Rerata Ekspor 2020-2024	Pangsa (%)
1	Tiongkok	55,6	23,0
2	Amerika Serikat	24,4	10,1
3	Jepang	19,3	8,0

Sumber: SEKI, diolah

Tabel B3.4.2. Tiga Besar Negara Asal Impor Indonesia

No.	Negara	Rerata Impor 2020-2024	Pangsa (%)
1	Tiongkok	57,8	27,8
2	Singapura	19,4	9,4
3	Jepang	15,1	7,3

Sumber: SEKI, diolah

Implementasi LCT Indonesia-Tiongkok dan LCT Indonesia-Jepang terus mengalami peningkatan pesat. Transaksi LCT terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir mencapai 22,2 miliar dolar AS pada periode Januari-November 2025. Volume transaksi LCT Indonesia-Tiongkok pada periode tersebut tercatat sebesar 10,5 miliar dolar AS, menjadikan LCT Indonesia-Tiongkok sebagai kontributor terbesar dengan pangsa 47,3% dari total transaksi LCT dengan seluruh negara mitra. Sementara itu, LCT Indonesia-Jepang mencatat volume transaksi sebesar 7,3 miliar dolar AS dengan pangsa 32,9%. Pemanfaatan LCT banyak dilakukan pada sektor-sektor strategis sehingga menggambarkan penerapan kerangka kerja LCT yang makin luas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian ini mencerminkan bahwa implementasi LCT memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha. Korporasi Tiongkok dan Jepang yang beroperasi di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi biaya dan mengurangi eksposur risiko nilai tukar dengan menggunakan mata uang lokal.



Potensi pasar LCT Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Jepang yang masih cukup besar terus dijangkau dengan perluasan kerangka cakupan kerja sama. Pengembangan ekosistem LCT terus dilakukan pada aspek *product, pricing, participant*, dan *infrastructure*. Kerja sama LCT Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Jepang diperkuat melalui penandatanganan penguatan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan Bank Sentral Tiongkok pada 25 Mei 2025 serta *Memorandum of Commitment* (MOC) dengan Kementerian Keuangan Jepang pada 15 Desember 2025. Kesepakatan ini memperluas kerangka cakupan kerja sama LCT hingga meliputi penyelesaian transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan yang sekaligus disinergikan dengan inisiatif sistem pembayaran lintas negara. Kerja sama antara Indonesia-Tiongkok juga makin diperkuat dengan pembentukan *Joint Work Program* untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif program bersama di level teknis. Lebih lanjut, penguatan sinergi juga dilakukan dengan Kementerian/Lembaga anggota Satuan Tugas Nasional LCT (Satgasnas LCT) serta otoritas negara mitra.

Sosialisasi LCT terus dilakukan sepanjang tahun 2025 dengan prinsip 3T (*Targeted, Terintegrasi, Terencana*) serta disinergikan dengan inisiatif sistem pembayaran lintas negara. Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Tiongkok melakukan kampanye *high level* bersama LCT dan QR antarnegara Indonesia-Tiongkok yang diselenggarakan secara paralel di Beijing dan Jakarta pada 11 September 2025. Pada koridor LCT Indonesia-Jepang, Bank Indonesia dan Otoritas Jepang antara

lain Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Payments Japan Association (PJA), dan Japan Quick Response (JPQR) melaksanakan kampanye *high level* bersama LCT dan QR antarnegara secara paralel di Jakarta dan Osaka pada 25 Agustus 2025. Kegiatan ini mencerminkan upaya kolaborasi strategis dalam mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal, mempercepat implementasi QR, serta mempererat hubungan bilateral.

Sinergi perluasan penggunaan mata uang lokal mendukung pendalaman pasar keuangan domestik. Sejalan dengan upaya peningkatan transaksi mata uang lokal kebutuhan likuiditas RMB dan JPY pada pasar uang domestik juga mengalami peningkatan sementara permintaan IDR di Tiongkok atau Jepang masih terbatas. Pengembangan pasar uang valas RMB dan JPY domestik perlu dilakukan untuk menjaga nilai tukar rupiah. JPY dan RMB (a.l. CNY dan CNH) termasuk dalam mata uang yang dominan ditransaksikan di pasar valas domestik. Dengan memastikan likuiditas RMB dan JPY di pasar domestik yang memadai, Bank dapat membeli RMB atau JPY secara langsung di *interbank market* sehingga harga terbentuk melalui *direct quotation* (RMB/IDR atau JPY/IDR). Pendalaman pasar valas RMB/JPY melalui penguatan sumber-sumber likuiditas RMB/JPY dilakukan melalui perluasan produk, peningkatan kapabilitas Bank ACCD dalam penyediaan likuiditas RMB/JPY, maupun penguatan kerja sama keuangan internasional antar-otoritas terkait.